



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MAJALAH WARTA PEMERIKSA
JANUARI 2024

wfp



BPK SATU, BPK HEBAT

Integrasi dan sinergi seluruh insan BPK adalah fondasi utama keberhasilan BPK untuk terus bertumbuh dan menginspirasi.

Integrasi dan sinergi seluruh insan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi fondasi utama keberhasilan lembaga untuk bisa terus tumbuh dan menginspirasi. Hal ini menjadi penekanan Ketua BPK Isma Yatun dalam pidatonya pada upacara peringatan HUT BPK ke-77 yang digelar pada 17 Januari 2024.

Peringatan HUT kali ini mengusung tema "BPK Satu, BPK Hebat". Tema ini sekaligus menjadi doa dan harapan atas peran lembaga yang semakin kuat dalam mendukung visi pencapaian Indonesia Maju 2045.

Semangat untuk menjadi "BPK Satu, BPK Hebat" menjadi salah satu isu utama yang diangkat *Warta Pemeriksa* pada edisi perdana pada 2024 ini. Semangat ini juga yang mendorong redaksi untuk terus melakukan inovasi dan perubahan sehingga dapat terus mengikuti perkembangan dan memberikan yang terbaik untuk pembaca.

Satu perubahan yang mencolok adalah desain. Mulai edisi Januari 2024, *Warta Pemeriksa* hadir dengan desain baru yang lebih segar dan menarik. Mulai dari halaman muka hingga tata letak yang lebih menyejukan mata.

Tak hanya untuk edisi cetak, redaksi juga melakukan perubahan desain untuk *Warta Pemeriksa* digital. Melangkah lebih lanjut, kami juga membuat satu karakter baru untuk *Warta Pemeriksa* versi digital dengan mengusung nama WP Digi dengan alamat domain www.wartapemeriksa.bpk.go.id.

Di dalam edisi Januari 2024, redaksi juga menyiapkan berbagai ucapan doa dan harapan dari berbagai tokoh untuk BPK. Mulai dari Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, hingga Auditor General Australia National Audit Office Grant Hehir.

Simak juga rubrik BPK Perwakilan yang kembali menyapa pembaca sekalian. Untuk edisi perdana, kami menampilkan BPK Perwakilan Kalimantan Barat yang meraih juara ketiga untuk LHP Terbaik.

Akhir kata, redaksi menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh pegawai BPK dan semoga ke depannya kita dapat terus memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia tercinta.

SOROTAN	4	BPK Bersatu untuk BPK Lebih Hebat
	8	Menjaga Kualitas Pemeriksaan BPK
	15	BPK dari Masa ke Masa
BPK BEKERJA	18	Unitisasi Jambaran-Tiung Biru Masih Terdapat Masalah
	21	BPK Ungkap Masalah dalam Pengelolaan Tambang Minerba
SHARING KNOWLEDGE	25	Memantau Tindak Lanjut Rekomendasi
INTERNASIONAL	28	Ketua BPK Sampaikan Terima Kasih kepada SAI Arab Saudi
SOSOK	30	Slamet Edy Purnomo, Anggota VII BPK Berkolaborasi untuk Mewujudkan Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat
SUDUT PANDANG	36	Doa dan Harapan untuk BPK
KESEHATAN	40	<i>New Year, New Me</i>
BPK PERWAKILAN	42	BPK Perwakilan Kalbar Raih Juara Ketiga LHP Terbaik
TEKNOLOGI	46	Mengungkap Peluang AI dalam Membantu Pemeriksaan BPK
KILAS	51	Mulai Pemeriksaan 35 K/L, Ketua BPK Ingatkan Soal Permasalahan Berulang
	53	BPK Serahkan Laporan PKN dan Pemeriksaan Investigatif kepada KPK
	55	Anggota I BPK: Pemeriksaan Harus Komprehensif dan Terarah
	56	Anggota II BPK Minta Pemeriksaan LK Kementerian PPN/Bappenas Tepat Waktu
	58	BPK Dorong PUPR Tingkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut
	60	<i>Stakeholder</i> Harapkan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Berkualitas
	62	Ini Hal yang Disoroti BPK Terkait Kompensasi BBM dan Listrik
KOLOM	65	Pemilu 2024 dan Kontribusi BPK Untuk Negeri

Pengarah Isma Yatun, Hendra Susanto, Nyoman Adhi Suryadnyana, Daniel Lumban Tobing, Haerul Saleh, Ahmadi Noor Supit, Pius Lustrilanang, Slamet Edy Purnomo, **Penanggung Jawab** Bahtiar Arif, **Wakil Penanggung Jawab** R. Yudi Ramdan Budiman, **Ketua Tim Redaksi** Sri Haryati, **Kepala Sekretariat** Bestantia Indraswati, **Sekretariat** Fitri Yuliantri Permana, Klara Ransingin, Ridha Sukma, Ratna Tri Darmayanti, Apriyana, Sudarman, **Alamat Sekretariat** Gedung BPK RI Jalan Gatot Subroto no 31, Jakarta, **Telepon** 021-25549000 Pesawat 1188/1187, **Email** wartapemeriksa@bpk.go.id
Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

bpk.go.id



Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.
(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

BPK Bersatu untuk BPK Lebih Hebat

1 Januari 2024 menandai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia genap berusia 77 tahun. Untuk menyemarakkannya, berbagai kegiatan telah dilaksanakan. Peringatan HUT ke-77 BPK mengusung tema “BPK Satu, BPK Hebat”. Tema tersebut sekaligus menjadi doa dan harapan atas peran BPK yang semakin kuat dalam mendukung visi pencapaian Indonesia Maju 2045. Sejalan dengan tema itu, Ketua BPK Isma Yatun menekankan, integrasi dan sinergi seluruh insan BPK adalah fondasi utama keberhasilan BPK untuk bisa terus bertumbuh dan menginspirasi.

"Sebuah semangat yang merefleksikan harapan seluruh insan BPK agar kita semua, keluarga besar BPK, semakin rekat bersatu dalam menjalankan amanat yang diemban, untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Isma dalam pidatonya pada Upacara Peringatan HUT ke-77 BPK yang digelar pada 17 Januari 2024.



Menurut Isma, perjalanan BPK selama 77 tahun tidak mudah. Tiga nilai utama BPK yakni independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi kekuatan penting untuk bisa mengarungi berbagai tantangan.

Dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK juga telah berupaya meningkatkan kualitas dan manfaat pemeriksaan untuk meningkatkan kontribusi dalam pencapaian tujuan negara. Di antaranya, BPK telah berhasil melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga semester I tahun 2023 sebesar Rp132,69 triliun.



Isma mengatakan, saat ini BPK terus bertransformasi untuk bisa memenuhi tuntutan tugas dan fungsinya. Selain pengembangan struktur dan tata kerjanya, BPK juga melakukan serangkaian inovasi dalam menjalankan proses bisnisnya melalui BPK Digital Enterprise Architecture. Hal ini juga diikuti dengan pengembangan sistem informasi yang menjadi *backbone* pelaksanaan tugas dan fungsi BPK, di antaranya adalah SMP, SiAP, Big Data Analytics, BPK General Office Automation serta sistem informasi pendukung lainnya yang telah terintegrasi membentuk Digital Audit Ecosystem.





"Evolusi kelembagaan ini tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK di dalam negeri, tetapi juga perkembangan peran BPK di dunia internasional," ungkapnya.

Hal itu kemudian turut mendukung torehan prestasi BPK di kancah internasional. Rangkaian capaian membanggakan itu seperti terpilihnya BPK sebagai tuan rumah International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) ke-26 pada tahun 2028 dan menjadi Ketua Organisasi BPK se-dunia atau INTOSAI periode 2028 hingga 2031 serta menjadi Head of Secretariat ASEANSAL Periode 2024 hingga 2029. Menurut Isma, ini merupakan refleksi atas kerja keras dan dedikasi insan BPK yang diapresiasi oleh *stakeholder* mancanegara.

Isma pun turut mengapresiasi kinerja dan prestasi dalam memajukan BPK di banyak bidang sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas BPK. Pertama, yakni pengembangan transformasi digital. BPK telah meraih Sertifikasi ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari Komite Akreditasi Nasional dan sertifikat Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan HAM dalam pengembangan 10 Aplikasi BPK.





Kedua, dalam bidang Pemeriksaan Investigasi, BPK telah memperoleh Akreditasi atas Laboratorium Forensic Digital (LFD). Ketiga, Badiklat telah mendapatkan sertifikasi sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pemeriksaan Keuangan dari Lembaga Administrasi Negara.

Keempat, BPK mendapat penghargaan sebagai lembaga informatif dari Komisi Informasi Pusat. Kelima, selama lima tahun berturut-turut, BPK terpilih sebagai Terbaik I Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk Kategori Lembaga Negara. Selanjutnya, dalam bidang SDM, BPK meraih penghargaan Implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN Terbaik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam pengelolaan anggaran, laporan keuangan BPK meraih opini WTP selama enam belas tahun berturut-turut. Pada tahun anggaran 2023, BPK bahkan menempati peringkat kedua penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga dengan capaian 99,82 persen.

Efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, yang terimplementasi melalui dukungan terhadap peningkatan sumber daya anggaran BPK.



"Alhamdulillah, anggaran BPK terus meningkat dari tahun 2022 hingga 2024. Dari Rp4,0 triliun menjadi Rp4,9 triliun atau tumbuh sebesar 22,67 persen. Kepercayaan ini hendaknya terus kita jaga, agar BPK yang bebas dan mandiri dapat mengoptimalkan perannya dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkapnya.

Isma mengingatkan BPK perlu terus menjawab tantangan zaman. Dia menyebut, terdapat tantangan seperti penegakan nilai-nilai dasar BPK serta pencegahan pelanggaran kode etik yang harus menjadi perhatian dan mendapat komitmen serius.

"Penegakan integritas dan kode etik menjadi titik krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik pada BPK," ujar Isma.

Isma juga menyebutkan, implementasi independensi anggaran sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK telah dimulai dengan perencanaan dan penganggaran BPK untuk Tahun 2025. Menurutnya, seluruh insan BPK perlu berkomitmen dan saling mendukung dalam implementasinya.

Kemudian, diperlukan peningkatan berkelanjutan atas tujuan, kualitas, dan manfaat pemeriksaan harus tetap menjadi prioritas kita semua, termasuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target Indonesia emas 2045.

"Saya yakin, dengan kesatuan komitmen dan upaya yang konsisten dari seluruh insan BPK, kita mampu menghadapi segala tantangan dan mewujudkan tujuan bersama," ujarnya.



Menjaga Kualitas Pemeriksaan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan kembali melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKPP/LKKL/LKBUN) untuk Tahun Anggaran 2023. Hal ini merupakan salah satu tugas konstitusional BPK seperti diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Tujuan pemeriksaan itu yakni memberikan keyakinan memadai bahwa LKPP/LKKL/LKBUN bebas dari salah saji material baik karena kecurangan maupun kesalahan.

Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto menyampaikan, BPK dituntut untuk dapat memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Hal itu diukur dari seberapa jauh pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku serta hasil pemeriksaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kemudian, kebermanfaatannya diukur dari seberapa besar hasil pemeriksaan BPK dapat menambah keyakinan pemangku kepentingan atas LK pemerintah, dan seberapa besar hasil pemeriksaan BPK memberikan manfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Hal itu dapat diperoleh dari penerapan pengendalian mutu yang memadai, termasuk penerapan kode etik pemeriksaan secara konsisten.

"BPK berupaya agar enam pilar standar pengendalian mutu dapat diimplementasikan dengan baik untuk memberikan keyakinan bahwa pemeriksaan BPK telah mencapai standar kualitas yang ditetapkan," ungkap Hendra dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN di Kantor Pusat BPK, Jumat (12/1/2024).

Enam pilar standar pengendalian mutu BPK itu antara lain tanggung jawab BPK terhadap mutu, persyaratan etika, perencanaan dan pertimbangan risiko, sumber daya manusia, kinerja pemeriksaan, dan pemantauan. Menurut Hendra, enam pilar pengendalian mutu tersebut tidak hanya berlaku pada tingkat kelembagaan tapi juga sangat penting diterapkan pada tingkat penugasan pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan kali ini yakni pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN.

"Saya meminta agar setiap tim pemeriksaan melaksanakan pengendalian mutu yang sesuai dengan standar," ujarnya.

Dengan menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, Hendra berharap dapat menjadi upaya pemulihan reputasi BPK. Dia mendorong agar setiap insan BPK secara serentak mengambil tanggung jawab pribadi dalam menegakkan nilai-nilai integritas, dan tidak hanya tergantung pada sistem.

"BPK berupaya agar enam pilar standar pengendalian mutu dapat diimplementasikan dengan baik untuk memberikan keyakinan bahwa pemeriksaan BPK telah mencapai standar kualitas yang ditetapkan."

Wakil Ketua BPK,
Hendra Susanto



"Kita sebagai lembaga yang ditunjuk untuk memeriksa harus dapat memastikan hasil pemeriksaannya itu adalah berkualitas dan bermanfaat."

Anggota I BPK/Pimpinan
Pemeriksaan Keuangan Negara I,
Nyoman Adhi Suryadnyana

Kemudian, seluruh pegawai BPK juga perlu terus berkolaborasi dengan pihak lain yang mau menjadi bagian dalam pemulihan reputasi BPK. "Mari kita semua ikut ambil bagian menjadi etalase kehumasan BPK untuk menyebarkan berita-berita baik tentang BPK," ungkap Hendra.

Hendra juga menyampaikan pentingnya penguatan metodologi dan manajemen pemeriksaan. Hal itu yakni dengan meningkatkan efektivitas penerapan *risk base audit*, sehingga dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dengan tetap menjaga kualitas hasil pemeriksaan.

Kemudian, mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIAP secara penuh untuk melakukan pengelolaan dan dokumentasi proses pemeriksaan. Hendra juga meminta untuk meningkatkan peran pemeriksa senior, dalam melakukan *reviu berjenjang* dan mengambil pertimbangan profesional terhadap penilaian risiko, respons terhadap risiko, dan perumusan simpulan pemeriksaan. Kemudian, menerapkan SA 600 secara lebih efektif, baik terhadap Tim Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK sendiri maupun oleh Akuntan Publik.

"Koordinasi dan komunikasi juga diperlukan antar-AKN dan unit pendukung lainnya. Mari kita rapatkan barisan untuk mewujudkan visi BPK menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara," ungkap Hendra.

Dalam workshop tersebut, para anggota BPK turut memberikan pengarahan pada pemeriksa. Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan, aturan pelaksanaan APBN Tahun 2023 telah menuntut penggunaan anggaran yang dapat meningkatkan produktivitas, integrasi ekonomi, kualitas SDM, serta sarana dan prasarana. Sehingga, untuk mencapai itu, pemerintah telah melakukan belanja negara sebesar Rp 3.121,9 triliun dengan pendapatan mencapai Rp 2.774 triliun. Kemudian, terjadi defisit sebesar Rp 347 triliun dan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp 359 triliun.

"Ini adalah jumlah uang yang sangat besar sekali," ungkap Nyoman.

Dia menekankan, hal ini menuntut keseriusan BPK untuk mencermati penggunaan anggaran. Sehingga, anggaran tersebut harus benar-benar membawa manfaat untuk negara. Terlebih lagi, dengan postur tersebut maka pembiayaan untuk defisit akan menjadi beban bagi tahun-tahun selanjutnya.

"Kita sebagai lembaga yang ditunjuk untuk memeriksa harus dapat memastikan hasil pemeriksaannya itu adalah berkualitas dan bermanfaat," ungkap Nyoman.

Sementara itu, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing menyampaikan, terdapat tantangan pemeriksaan yang perlu dihadapi dalam pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN kali ini. Hal itu yakni kompleksitas pemeriksaan dan keterbatasan sumber daya waktu.

Sehingga, dia pun mendorong adanya komunikasi dan koordinasi yang baik di setiap tahap pemeriksaan. Kemudian,

komitmen terhadap jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan, penguatan *Risk Based Audit*, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi. Dia juga menekankan peran penting Pokja Pemeriksaan LKPP.

"Komite Pelaksana untuk secara periodik memantau perkembangan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN. Tim Koordinasi, Tim Pengkaji, Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan, serta Tim Teknologi Sistem Informasi Pemeriksaan untuk melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya," ujar Daniel.

"Komite Pelaksana untuk secara periodik memantau perkembangan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN. Tim Koordinasi, Tim Pengkaji, Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan, serta Tim Teknologi Sistem Informasi Pemeriksaan untuk melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya."

Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II,
Daniel Lumban Tobing





Ketua BPK Isma Yatun sekaligus Plt Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III turut menekankan pentingnya perancangan rekomendasi BPK. Dia menyampaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK memiliki status hukum yang sangat kuat.

"Sehingga, jangan sampai LHP kita menjadi tidak berbobot, tidak profesional, dan tidak akurat," kata Isma.

Dalam perannya sebagai Ketua BPK, Isma juga menegaskan kepada jajarannya agar menaati standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik BPK dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Ia pun meminta kepada para Auditor Utama (Tortama), pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana BPK untuk saling menjaga, mengingatkan, dan menguatkan penerapan nilai-nilai dasar BPK di manapun berada. Menurutnya, hal ini adalah proses pengembalian kepercayaan publik atas marwah BPK.

"Ini memerlukan sinergi dan kolaborasi antarseluruh elemen di BPK. Tidak ada sekat-sekat di antara kita dan kita berkomitmen untuk selalu menjaga satu sama lain untuk meningkatkan efektivitas kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan kita," ujarnya.

**"Ini memerlukan sinergi dan kolaborasi antarseluruh elemen di BPK.
Tidak ada sekat-sekat di antara kita dan kita berkomitmen untuk selalu menjaga satu sama lain untuk meningkatkan efektivitas kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan kita."**

Ketua BPK, Plt Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Isma Yatun

Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh menekankan, BPK harus mulai memberikan perhatian lebih pada transaksi keuangan dari kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak keuangan signifikan di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan upaya BPK dalam memberikan analisis *foresight*. Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian seperti kebijakan transisi energi, pembangunan IKN, dan kebijakan terkait perubahan iklim.

Senada dengan arahan anggota lainnya, Haerul juga mendorong agar pemeriksaan BPK harus memegang teguh nilai-nilai dasar BPK. Hal ini agar tidak terjadi lagi permasalahan terkait dengan pelanggaran etika yang melibatkan pemeriksa BPK dan mencoreng nama baik BPK.

"BPK adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Strategi deteksi *fraud* menjadi topik yang juga ditekankan oleh Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit. Dia menyampaikan, pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesionalnya. Kemudian, pemeriksa harus memodifikasi prosedur untuk mengidentifikasi terjadinya kecurangan.

Pemeriksa harus mengidentifikasi faktor risiko kecurangan yang berdampak material terhadap opini. Namun, pemeriksa juga tetap perlu ingat bahwa tidak berwenang menyatakan kecurangan telah terjadi karena istilah kecurangan merupakan ranah hukum.

Menurut Ahmadi, saat ini transformasi digital BPK juga telah membantu proses pemeriksaan BPK. Sehingga, pemeriksa pun perlu memanfaatkan dukungan teknologi tersebut.

"Hasil BDA (*big data analytic*) pada portal Bidics harus digunakan oleh pemeriksa LKPP/LKKL/LKBUN dan LKPD untuk mendukung proses pemeriksaan yang efektif dan efisien sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan," ujarnya.

"Selama ini hasil pemeriksaan yang terdapat *crosscutting* dengan entitas lain AKN kurang dikomunikasikan sehingga seringkali entitas kesulitan dalam menyelesaikan temuan."

Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII,
Slamet Edy Purnomo



Sementara itu, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang menyoroti bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan. Adapun latar belakang dari dikeluarkannya peraturan tersebut karena diperlukan pengaturan substansi terkait perencanaan pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran.

Oleh karenanya dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan kementerian lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan bersama dengan laporan kinerja. Menurutnya, penerapan peraturan ini akan menimbulkan risiko dalam pemeriksaan laporan keuangan baik di tingkat K/L maupun pemerintah pusat.

"Oleh karena itu, saya berharap Pokja LKPP dapat mengkaji strategi pemeriksaan sebagai respons atas implementasi aturan tersebut. Saya juga berharap, seluruh komponen yang terlibat dalam pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN dapat bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan tugas pemeriksaan," ujarnya.

Kemudian, Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo menekankan

pentingnya pembahasan *crosscutting issues* dalam pemeriksaan utamanya di lingkup yang berkaitan dengan BUMN. Menurutnya, terdapat sejumlah permasalahan di BUMN yang terkait dengan kebijakan K/L maupun pemda.

Dia mencontohkan, isu subsidi dan kompensasi listrik berkaitan dengan PT PLN (Persero) sebagai operator penugasan dari pemerintah. Sementara, kebijakan itu berkaitan erat dengan Kementerian ESDM yang merupakan entitas di bawah naungan AKN IV.

Koordinasi penting dilakukan karena permasalahan ini bisa memicu inefisiensi keuangan negara. Slamet menekankan, selama ini hasil pemeriksaan yang terdapat *crosscutting* dengan entitas lain AKN kurang dikomunikasikan sehingga seringkali entitas kesulitan dalam menyelesaikan temuan. Ini karena menyangkut wewenang K/L lain atau bahkan terdapat potensi rekomendasi pemeriksaan yang bertentangan dari dua LHP berbeda.

"Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi antar-AKN," ujar Slamet.

BPK dari Masa ke Masa



◀ R. Soerasno



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdiri pada 1 Januari 1947, berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat (5). Saat pertama berdiri, BPK hanya memiliki sembilan orang pegawai dan sebagai Ketua yang pertama adalah R. Soerasno.

Pada awalnya, BPK menempati eks Gedung ANIEM yaitu gedung kantor perusahaan listrik umum Hindia Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Selama masa revolusi, situasi negara yang genting menyebabkan kantor BPK harus berpindah-pindah tempat.

Pada masa Dewan Pengawas Keuangan, BPK akhirnya mulai dapat menetap dalam jangka waktu yang cukup lama di Bogor, tempat tersebut dulunya merupakan tempat kedudukan Algemene Rekenkamer atau BPK-nya Hindia Belanda.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai kembali ke UUD 1945, maka nama Dewan Pengawas Keuangan kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan. Pada masa ini, baik pemerintah maupun BPK berusaha sekuatnya untuk mewujudkan Undang-Undang tentang BPK. Perpu No. 6 Tahun 1964 disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang BPK.

Undang-undang tersebut merupakan undang-undang pertama yang mengatur BPK. Sebelumnya, BPK hanya mengacu kepada undang-undang masa kolonial Belanda.

BPK terus berbenah, memperbaiki diri dan berupaya keras melakukan perbaikan keuangan negara melalui berbagai kegiatan. Pada tahun 60-an pemeriksaan keuangan ditingkatkan melalui berbagai operasi. BPK juga berhasil mengaktifkan kembali penyusunan laporan hasil pemeriksaan BPK dengan nama Laporan Tahunan BPK.

Kemudian, sejak tahun 1974 diberlakukan penyampaian laporan tahunan ke DPR secara formal serta mulai disusunnya mekanisme hubungan kerja antara BPK dan DPR.



Di bidang kelembagaan, BPK turut aktif dalam keanggotaan internasional. Kiprah BPK dimulai sejak tahun 1956, yaitu turut serta dalam International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

Peran BPK dalam kancah internasional tidak dapat dianggap sebelah mata. BPK juga turut aktif dalam kelembagaan Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) dan menjadi penggagas berdirinya ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI).

Pada masa Orde Baru, kantor BPK dipindahkan ke Jakarta. Walau sempat mengalami beberapa kali perpindahan, namun akhirnya BPK menetap di Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta, dan berakhir sudah masa dimana kantor BPK selalu berpindah-pindah sejak pertama kali berdiri tahun 1947.

Pada era reformasi, BPK mendapatkan dukungan konstitusional yang memperkuat kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa yang independen dan profesional. Hasil amandemen UUD 1945 dan dikeluarkannya paket tiga undang-undang tentang keuangan negara pada tahun 2003 dan 2004 memberikan kewenangan yang lebih kuat dan jelas kepada BPK. Hal tersebut menjadi dasar disusunnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa BPK harus memiliki perwakilan di tiap provinsi. Pembentukan kantor perwakilan memperkuat posisi BPK dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.

Dengan kedudukan dan wewenang tersebut, BPK semakin kokoh dalam mendorong penegakan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik, untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.



Pengamanan Data

01

Cadangkan (backup) data secara teratur ke media yang terpisah

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (bajakan)

02

Aktifkan fitur Bitlocker yang tersedia di perangkat terstandarisasi BPK

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (flashdisk, external HDD)

03

Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya Memahami extension file

04

Memahami fungsi dasar file Contoh : file ber-extension .exe merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



[BPK RI Official](https://www.youtube.com/BPKRIOfficial)



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpkri](https://www.tiktok.com/@bpkri)



Unitisasi Jambaran-Tiung Biru Masih Terdapat Masalah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan infrastruktur, yaitu hasil pemeriksaan atas pengembangan lapangan gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB). Hal itu merupakan salah satu proyek strategis nasional, klasifikasi proyek pipa gas/*terminal liquid petroleum* gas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lapangan Gas Unitisasi JTB yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur ini adalah penggabungan Lapangan Jambaran yang terdapat pada Wilayah Kerja (WK) Cepu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) operator ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) dan Lapangan Tiung Biru yang terdapat pada WK Nusantara dengan KKKS operator PT Pertamina Eksplorasi Produksi (PT Pertamina EP).



TWITTER.COM/PERTAMINA

"Permasalahan signifikan yang ditemukan yaitu hasil pekerjaan proyek *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning* (EPCC) Gas Processing Facility (GPF) yang dilaksanakan oleh Konsorsium RJJ belum sepenuhnya sesuai dengan lingkup pekerjaan pada kontrak dan perubahannya."

PT Pertamina EP Cepu (PT PEPC), yang merupakan pemilik partisipasi (*participating interest*) 45 persen pada WK Cepu, ditunjuk sebagai Operator Lapangan Gas Unitisasi JTB sejak ditandatanganinya *Head of Agreement* antara EMCL, PT PEPC, dan PT Pertamina EP tentang Unitisasi Lapangan JTB pada 17 Agustus 2011. Pada tanggal 20 September 2022, SKK Migas dan PT PEPC telah berhasil melakukan kegiatan *on stream* gas pada Lapangan Gas Unitisasi JTB dan sampai dengan tanggal 18 November 2022 telah dilakukan *lifting* gas sebesar 1.391,71 Million Standard Cubic Feet (MMSCF).

Pada semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB tahun 2017-semester I 2022 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), KKKS PT Pertamina EP Cepu (PT PEPC), dan instansi terkait di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pengembangan lapangan gas dilakukan untuk mendukung Program Prioritas (PP) 4 yakni infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya KP kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-7, terutama target 7.1, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB tahun 2017-semester I 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan yaitu hasil pekerjaan proyek *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Gas Processing Facility (GPF)* yang dilaksanakan oleh Konsorsium RJJ belum sepenuhnya sesuai dengan lingkup pekerjaan pada kontrak dan perubahannya. Hal itu seperti terdapat pengurangan lingkup pekerjaan dan deviasi spesifikasi teknis hasil pekerjaan yang belum ditetapkan sebagai *contract change order (CCO)* pengurang nilai kontrak EPCC GPF sebesar 6,99 juta dolar AS. Kemudian, volume item pekerjaan terpasang yang kurang dari dokumen pendukung pembayaran sebesar 2,53 juta dolar AS.

Selain itu, terdapat keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan EPCC GPF. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya operasi atas hasil pekerjaan EPCC GPF yang tidak sesuai lingkup pekerjaan minimal sebesar 9,52 juta dolar AS (6,99 juta dolar

AS+ 2,53 juta dolar AS). Kemudian, terdapat denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan EPCC GPF berpotensi tidak menambah bagi hasil bagian negara sebesar 82,79 juta dolar AS dan negara kehilangan potensi pendapatan dari gas yang tidak dapat dijual untuk periode 20 September-18 November 2022 karena belum selesainya seluruh GPF minimal sebesar 5,84 juta dolar AS.

"BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan Kepala Unit Percepatan Proyek (UPP) JTB SKK Migas berkoordinasi dengan Direktur Utama PT PEPC untuk menetapkan CCO EPCC GPF minimal sebesar 6,99 juta dolar AS dan memperhitungkannya sebagai pengurang nilai amendemen kontrak, mengenakan denda keterlambatan kepada Konsorsium RJJ sebesar 82,79 juta dolar AS, dan segera menyelesaikan pekerjaan EPCC GPF."

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan Kepala Unit Percepatan Proyek (UPP) JTB SKK

Migas berkoordinasi dengan Direktur Utama PT PEPC untuk menetapkan CCO EPCC GPF minimal sebesar 6,99 juta dolar AS dan memperhitungkannya sebagai pengurang nilai amendemen kontrak, mengenakan denda keterlambatan kepada Konsorsium RJJ sebesar 82,79 juta dolar AS, dan segera menyelesaikan pekerjaan EPCC GPF.

Kemudian, Kepala Divisi Pemeriksaan Perhitungan Bagian Negara SKK Migas untuk tidak memperhitungkan biaya item pekerjaan yang kurang terpasang dalam *close out Authorization for Expenditure (AFE) GPF* minimal sebesar 2,53 juta dolar AS, dan memperhitungkan denda keterlambatan sebagai pengurang nilai proyek pada proses *close out AFE GPF*.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB mengungkapkan 4 temuan yang memuat 7 permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan SPI dan 6 ketidakpatuhan sebesar Rp40,65 miliar dan 103,37 juta dolar AS atau total ekuivalen Rp1,59 triliun.

BPK Ungkap Masalah dalam Pengelolaan Tambang Minerba



ESDM.GO.ID

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Hal itu diungkap melalui pemeriksaan yang dirampungkan pada semester I 2023.

Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara TA 2020-triwulan III 2022 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara TA 2020-triwulan III 2022 pada Kementerian ESDM, KLHK, serta instansi terkait lainnya dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain terdapat pelanggaran kontrak penjualan batu bara kebutuhan dalam negeri. Hal itu berupa kekurangan/keterlambatan pemenuhan pasokan kontrak kebutuhan batu bara dalam negeri untuk kelistrikan umum oleh badan usaha pertambangan (BUP) serta pemegang izin pengangkutan dan penjualan (IPP) batu bara periode September 2021 sampai dengan triwulan III 2022, namun atas pelanggaran tersebut belum ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif.

Hal ini mengakibatkan antara lain potensi denda pelanggaran yang belum dikenakan oleh Ditjen Minerba sebesar 1,44 miliar dolar AS.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM supaya menginstruksikan Dirjen Minerba antara lain agar melakukan klarifikasi terhadap kekurangan/keterlambatan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri untuk kelistrikan umum kepada BUP serta pemegang IPP batu bara, dan menetapkan denda berdasarkan hasil klarifikasi.

Selain itu, BPK mengungkapkan, perhitungan realisasi kemajuan fisik fasilitas pemurnian PT FI tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu yakni laporan hasil verifikasi kemajuan fisik 6 bulanan sebelum adanya perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian PT FI tidak menggunakan kurva S awal sebagai dasar verifikasi kemajuan fisik.

Hasil perhitungan persentase kemajuan fisik dibandingkan dengan rencana kumulatif menggunakan kurva S awal menunjukkan bahwa progres yang dicapai PT FI tidak mencapai 90 persen, sehingga memenuhi kriteria untuk dikenakan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam. BPK melakukan penghitungan potensi denda dengan menggunakan data realisasi penjualan ekspor PT FI dan diperoleh nilai potensi denda administratif keterlambatan sebesar 501,94 juta dolar AS. Hal ini mengakibatkan Negara berpotensi tidak segera memperoleh penerimaan denda administratif dari PT FI sebesar 501,94 juta dolar AS.

BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM menginstruksikan Dirjen Minerba untuk menetapkan kebijakan mengenai kejelasan formula perhitungan denda dan selanjutnya menghitung dan menetapkan potensi denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku, serta segera menyampaikan penetapan denda administratifnya kepada PT FI dan menyetorkan ke kas negara.



ESDM.GO.ID



ESDM.CO.ID

Kemudian, terdapat temuan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian minimal sebesar 100,07 juta dolar AS belum ditempatkan pada rekening bersama oleh 12 perusahaan dengan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian per semester I 2022 di bawah 75 perusahaan. Akibatnya, potensi penerimaan kas negara atas jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian minimal sebesar 100,07 juta dolar AS tidak dapat direalisasikan.

BPK merekomendasikan Menteri ESDM menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melakukan perhitungan kembali dan menempatkan jaminan kesungguhan serta menyetorkan ke kas negara apabila kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak mencapai persentase yang ditentukan.

Selain itu, BPK mengungkapkan, pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pada Ditjen Minerba belum sesuai ketentuan. Hal itu antara lain nilai penetapan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang kurang dilaporkan sebesar Rp832,26 miliar dan 58,00 juta dolar AS serta jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang belum ditempatkan, telah kedaluwarsa, dan bukti penempatan jaminan tidak dalam penguasaan total sebesar Rp145,29 miliar dan 6,71 juta dolar AS.

Hal ini mengakibatkan potensi kehilangan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang ditempatkan sebesar Rp832,26 miliar dan 58,00 juta dolar AS. Selain itu, negara tidak memiliki kepastian dana jaminan dari pemegang izin pertambangan yang tidak menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang serta berpotensi menanggung kerusakan lingkungan sebesar Rp145,29 miliar dan 6,71 juta dolar AS.

BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba supaya melakukan perhitungan ulang terkait pencatatan nilai jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang serta menetapkan dan menagihkan perusahaan untuk menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang sebesar Rp832,26 miliar dan 58,00 juta dolar AS. Kemudian, menginventarisasi kekurangan dan memastikan penguasaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebesar Rp145,29 miliar dan 6,71 juta dolar AS.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara mengungkapkan 25 temuan yang memuat 48 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 24 kelemahan SPI dan 24 ketidakpatuhan sebesar Rp1,51 triliun dan 116,53 juta dolar AS atau total ekuivalen Rp3,26 triliun.



@bpkriofficial



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@humasbpkri.official



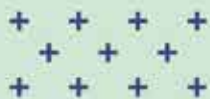
08111907010



@bpk.ri



▶ BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.



Memantau Tindak Lanjut Rekomendasi



▲
Dian Primartanto dan Ismah Alfah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak hanya memiliki mandat untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga berkewajiban melakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan daerah, kepada DPR, DPRD, maupun DPD.

Selain itu, rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP wajib ditindaklanjuti oleh entitas. BPK pun harus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Agar pemantauan berjalan efektif, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan lahir bersamaan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Sejalan dengan itu, BPK menciptakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Lewat sistem ini, pemantauan tindak lanjut diharapkan bisa berjalan dengan efektif.

Menurut Pemeriksa Ahli Madya BPK Dian Primartanto, terdapat sejumlah tantangan dalam pemantauan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP). Dian mengatakan, pemantauan kegiatan TLHP sejak lama sudah dilakukan meskipun sebelumnya tidak ada aturan resminya.

"Jadi praktiknya bagaimana, yang saya ingat waktu itu, pemantauan tindak lanjut (PTL) itu masih manual pakai kertas, pertemuan fisik, dibahas antara BPK dengan entitas. Matriksnya gimana, ya mirip serupa seperti sekarang, praktiknya diteruskan sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat, yang kita laksanakan saat ini, sudah dari dulu dilakukan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1965 itu. Termasuk penetapannya saat itu masih 3 statusnya, belum status 4.

Artinya, pemantauan tindak lanjut sudah dari dulu dilakukan paling tidak dari tahun 1973, mungkin dari 1965 juga sudah. Artinya ini praktik lama, praktik yang bukan baru," ucap Dian dalam kegiatan Komunitas Litbang Live, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, ada beberapa lingkup aktivitas Pemantauan TLHP, seperti yang tertulis dalam Peraturan BPK nomor 1 Tahun 2017, Pasal 20 ayat 1. Pertama, menatausahakan laporan hasil pemeriksaan. Kedua, menginvestarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

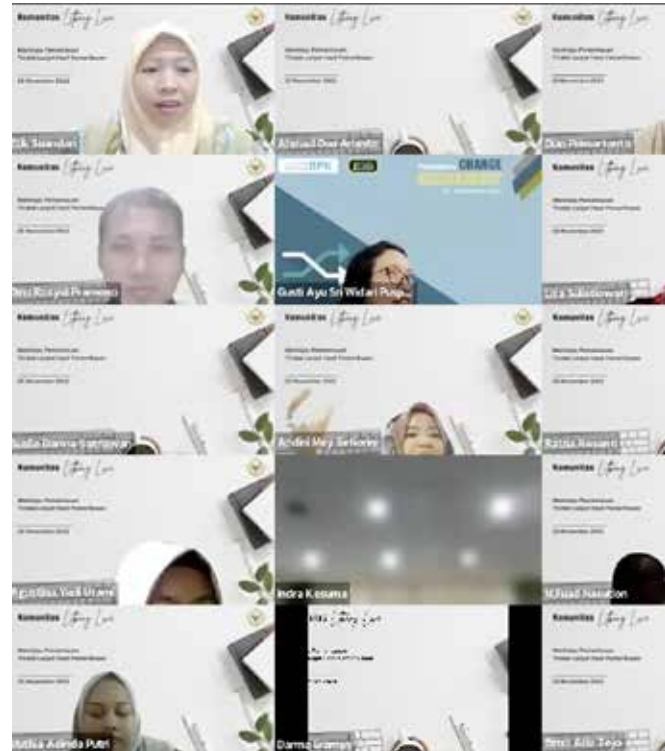
Ketiga, menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya. Keempat, menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.

Adapun sesuai Peraturan BPK No 2 Tahun 2017, ada empat klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi:

1. Tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat.
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai rekomendasi.
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh pejabat.
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan juga harus berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

Urgensi tindak lanjut

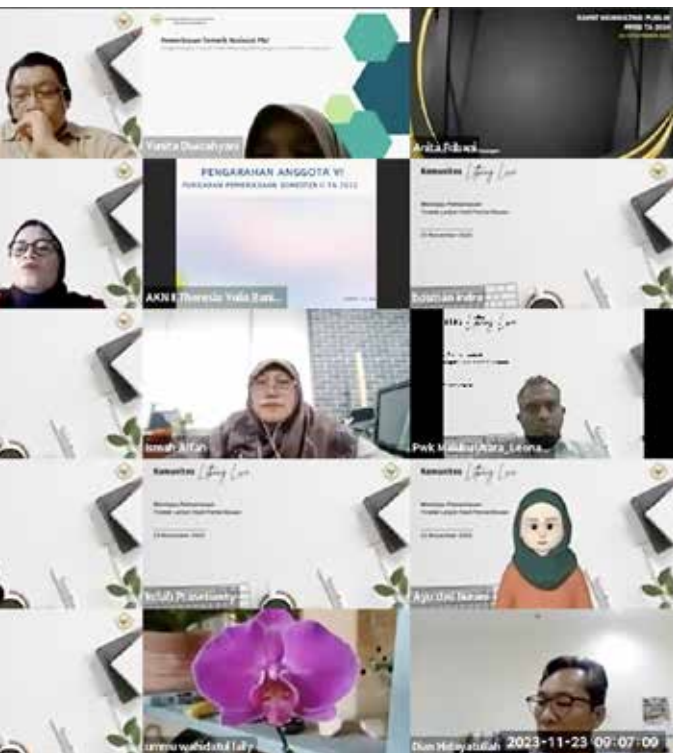
Tindak lanjut atas rekomendasi merupakan bagian dari nilai dan manfaat BPK bagi masyarakat. Karena dengan adanya wewenang pemantauan TLHP, maka menambah wewenang BPK terkait pemeriksaan keuangan negara.



Berdasarkan mandat, BPK berwenang penuh atas proses pemeriksaan yang terdiri atas pemilihan objek pemeriksaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, rekomendasi, dan ditambah lagi dengan pemantauan tindak lanjut. Sehingga, BPK berwenang penuh atas proses pemeriksaan dari hulu sampai hilir.

Dia menambahkan, pemantauan tindak lanjut tidak terlepas dari pemeriksaan. BPK harus memantau tindak lanjut rekomendasi oleh entitas. Pemantauan di saat yang sama memberikan keyakinan memadai sesuai dengan tingkat keyakinan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan SPKN.

"Nah, wewenang-wewenang di tindak lanjut itu menjadi celah bagi *auditee* dalam 'menyelesaikan masalah' dengan BPK. Karena tadi, tindak lanjut sudah selesai di status 1 sampai status 4, jadi ada risiko jika tidak ada pemantauan. Entah resiko pekerjaan kita yang keliru, atau resiko *moral hazard* dari pihak-pihak yang berpikiran negatif" ungkap dia.



Tantangan PTL

Saat ini yang menjadi tantangan dari pemantauan tindak lanjut (PTL) adalah pandangan terkait hal tersebut. Ia menyebutkan soal PTLHP apakah dipandang sama pentingnya dengan pemeriksaan. Hal ini amat terkait dengan tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan penjaminan mutu hasil pemeriksaan.

Tantangan lain adalah bagaimana memanfaatkan PTL. "Kembali lagi, kita menganggap penting atau tidak hasil PTL itu. Kemudian laporan pemantauan masuk ke dalam IHPS, IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan. Lalu, bagaimana lembaga perwakilan memanfaatkan hasil laporan pemantauan tidak lanjut?," kata dia.

Dia menjelaskan, di dalam LHP, pemeriksa membuat rekomendasi dengan keyakinan sebagai solusi perbaikan untuk permasalahan yang BPK temukan. Namun keyakinan itu, benar-benar jadi solusi apabila rekomendasi ditindaklanjuti.



Tindak lanjut itu memberikan dampak yang positif, sehingga pada ujungnya berdampak juga terhadap pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemantauan tindak lanjut akan berdampak bagus dan positif dan memperlihatkan nilai serta manfaat BPK. "Jadi, organisasi kelembagaan BPK tidak sekadar penelaahan belaka. Karena BPK memberikan perbaikan pengelolaan keuangan negara melalui rekomendasi dan mengonfirmasi dengan memantau tindak lanjut."

Ketua BPK Sampaikan Terima Kasih kepada SAI Arab Saudi





▲
Ketua BPK, Isma Yatun
saat menerima delegasi
General Court of Audit
(GCA) of the Kingdom
of Saudi Arabia atau SAI
Arab Saudi di kantor
pusat BPK, Jakarta.

◀
Ketua BPK, Isma Yatun
dan Vice President for
Performance Audit GCA
Abdullah Al Haigi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan apresiasi atas dukungan SAI Arab Saudi pada pencalonan sebagai tuan rumah Kongres Organisasi Lembaga Pemeriksa Tertinggi Internasional (INTOSAI) 2028. Apresiasi itu disampaikan Ketua BPK Isma Yatun kepada delegasi General Court of Audit (GCA) of the Kingdom of Saudi Arabia atau SAI Arab Saudi.

"Terima kasih atas kepercayaan GCA of the Kingdom of Saudi Arabia yang telah memilih BPK sebagai rekan diskusi dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk memperdalam kapasitas audit, khususnya dalam topik yang dibahas dalam pertemuan ini," ungkap Isma dalam *courtesy meeting* di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Isma juga mengapresiasi kerja sama BPK dengan SAI Arab Saudi untuk meningkatkan kapasitas audit. Dia berharap pertemuan ini dapat memperkuat hubungan bilateral antara BPK dan SAI Arab Saudi, khususnya kapasitas kedua institusi. Serta memperdalam pemahaman mengenai pemeriksaan keuangan.

Pertemuan yang dihadiri oleh delegasi SAI Arab Saudi yang dipimpin Vice President for Performance Audit GCA Abdullah Al Haigi ini merupakan awal dari rangkaian kunjungan bilateral yang berlangsung selama dua hari. Kunjungan dilakukan atas permintaan SAI Arab Saudi dengan tujuan agar BPK dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pemeriksaan.

Khususnya dalam bidang perencanaan, evaluasi, dan analisis kebijakan audit, indikator kinerja utama, manajemen risiko, metodologi pemeriksaan kinerja dan monitoring tindak lanjutnya. Kemudian audit atas kesejahteraan masyarakat dan layanan publik, serta 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Abdullah Al Haigi menyampaikan bahwa kunjungan kali ini menggarisbawahi komitmen dan dedikasi untuk memperkuat kapasitas kedua institusi. Termasuk memperdalam pemahaman mengenai praktik-praktik terbaik dalam pengawasan keuangan publik.

Dia pun menjelaskan bahwa kerajaan Arab Saudi dan Indonesia memiliki komitmen yang sama dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang efektif.

Pertemuan ini diakhiri dengan penegasan kembali komitmen BPK dan SAI Arab Saudi untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang audit sektor publik. Ini diwujudkan dengan mengeksplorasi peluang kerja sama dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas pemeriksaan.

Berkolaborasi untuk Mewujudkan Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat

Kolaborasi dalam melaksanakan pemeriksaan menjadi kata penting bagi Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo (SEP). Hal itu perlu dilakukan untuk mewujudkan pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Terlebih lagi, SEP yang kini membawahi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII memiliki portofolio pemeriksaan yang sangat krusial. Dalam perbincangan dengan *Warta Pemeriksa*, SEP mengungkapkan, portofolio pemeriksaan di AKN VII memiliki nilai secara konsolidasi mencapai Rp10 ribu triliun. Dengan PDB Indonesia yang berkisar Rp19 ribu triliun, artinya sekitar 60 persen gerak ekonomi berada di bawah pengawasan AKN VII. Ini sekaligus menegaskan peran penting pemeriksaan yang harus dilakukan.

"Berbagai program yang ada di BUMN itu hampir seluruhnya menyentuh hajat hidup orang banyak dan itu amanat UUD 1945, di mana sumber-sumber ekonomi, cabang-cabang produksi yang terkait hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara dan semaksimal mungkin, sebesar-besarnya harus dimanfaatkan untuk pembangunan nasional guna mencapai tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera," tegas SEP.



"Kalau kita memberikan rekomendasi ternyata tidak bisa ditindaklanjuti, berarti rekomendasi kita tidak memberikan manfaat untuk entitas."

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII/
Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo

SEP mengatakan, hal ini juga sejalan dengan visi dan misi BPK dalam rangka mengawal agenda pembangunan nasional. BPK pun telah mencanangkan *tagline* BPK Kuat dan BPK Satu. Sehingga, menurut SEP, seluruh insan BPK harus memiliki satu kepentingan yakni membangun lembaga BPK yang kompak dan kuat.

Dengan semangat itu, AKN VII tidak bisa melaksanakan strategi pemeriksaan secara sendiri-sendiri. SEP menegaskan, perlu ada kolaborasi yang lebih erat dengan AKN lain. Dia menjelaskan, kerap terjadi pemeriksaan yang bersifat operasional dan dilaksanakan oleh BUMN, namun kebijakan hulu berada di sisi kementerian/lembaga.

Dia mencontohkan, isu mengenai tarif listrik tidak hanya melibatkan PT PLN (Persero) sebagai operator, tapi juga ada keterkaitan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga, AKN VII harus intens berkolaborasi dengan AKN IV yang menaungi kementerian tersebut.

Saat ini, ungkap SEP, AKN VII juga tengah melakukan inventarisasi perselisihan atau *dispute* antar-BUMN. Dia menyampaikan, *dispute* ini kerap terjadi karena terjadi transaksi utang piutang antar-BUMN.

"Yang satu merasa punya tagihan, yang satu merasa punya utang sehingga muncullah *dispute*. Ini kita coba teliti dan kita minta Kementerian BUMN untuk mencari mekanisme solusi," ujarnya.

SEP kembali menegaskan, kunci untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan AKN lain. Dia menyoroti, sejumlah rekomendasi yang diberikan selama ini masih bersifat parsial. Contohnya, AKN VII memberikan rekomendasi pada suatu BUMN sementara kebijakan tersebut berada di lingkup kementerian teknis. Hal ini kemudian membuat rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti oleh entitas.

SEP pun mendorong agar seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK sudah terkonsolidasi dan memperhatikan *concern* dari AKN lain. Ini juga sejalan dengan proses bisnis BUMN yang kini saling terintegrasi dengan berbagai pihak. Dia mencontohkan, distribusi pupuk bersubsidi melibatkan pemerintah daerah yang mengajukan kuota. Dengan keterlibatan pemerintah daerah maka dalam isu pupuk turut terdapat andil AKN V dan AKN VI di BPK.

"Kalau kita memberikan rekomendasi ternyata tidak bisa ditindaklanjuti, berarti rekomendasi kita tidak memberikan manfaat untuk entitas," ujarnya.

Forum yang membahas *cross cutting issue* dalam pemeriksaan BPK, diharapkan bisa menjadi strategi konsolidasi. Ujungnya, menurut SEP, ini bisa memperkuat BPK ke depan.

"BPK menjadi bermanfaat baik bagi entitas maupun pembangunan negara," ujarnya.

Ke depannya, SEP menyampaikan, pemeriksaan juga perlu dilakukan secara lebih efisien. Dia mengakui, AKN VII memiliki keterbatasan sumber daya namun menghadapi tanggung jawab pemeriksaan yang begitu besar. SEP pun berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi guna mengatasi keterbatasan tersebut.

Dia mengatakan, pemeriksaan AKN VII ke depan harus disokong oleh *data analytic* yang mumpuni. Menurutnya, pemeriksaan ke depan tak bisa dilaksanakan secara sporadis tanpa ada basis data. "Kita potret terlebih dahulu, anomalnya, sumber-sumber risiko, dan isu-isu permasalahannya ada di mana saja," ujarnya.

Menurut SEP, BPK adalah gudang data. Akan tetapi, saat ini masih diperlukan perbaikan standardisasi data tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh para pemeriksa. BPK Big Data Analytics (Bidics), menurut SEP, dapat diperkuat untuk menyokong pemeriksaan di tubuh BUMN.

Dengan adanya dukungan *data analytic*, SEP meyakini pemeriksaan yang dilakukan tidak perlu membutuhkan waktu panjang. Dia menjelaskan, dalam praktik selama ini, pemeriksaan yang dilakukan bisa mencapai 100 hari walaupun hanya untuk perusahaan dengan nilai relatif kecil. Sementara, dengan *data analytic*, durasi pemeriksaan bisa ditekan hingga 50 persen karena data temuan dan hipotesis masalah yang dihadapi entitas sudah dipegang oleh pemeriksa sebelumnya.

"Sehingga, ketika pemeriksa ke lapangan hanya perlu melakukan konfirmasi atau pembuktian dari hasil hipotesis yang dalam dengan *data analytic* atas temuan itu," ujarnya.

Untuk merealisasikan *data analytic* itu, AKN VII mengembangkan *integrated audit framework* agar terjadi standardisasi data. Data yang diperlukan seperti pendapatan, beban, dan investasi akan mudah diakses oleh para pemeriksa. Dari sana, pemeriksa dapat melihat berbagai anomali yang kemudian dimasukkan dalam rencana kerja pemeriksaan.

"Yang tadinya 100 hari ya paling tidak bisa jadi hanya 60 hari. Harus bisa lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan dan rekomendasi," tegasnya.

Belajar dari berbagai krisis

Bagi SEP, BPK adalah lembaga yang sangat krusial dalam memperbaiki tata kelola guna mewujudkan pembangunan negara. "Dengan bekal keberanian untuk menawarkan *problem solving*, saya memberanikan diri untuk masuk BPK. Niat saya itu adalah ingin banyak belajar dan berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola dan *risk management* lembaga atau perusahaan," ujar SEP.

Sebelum menjadi Anggota BPK, SEP pernah berkarier di sejumlah bank swasta. Kemudian, ia mengajukan lamaran untuk bergabung dengan Bank Indonesia (BI) pada 1990. Dari 4.000 orang pelamar, ungkap SEP, saat itu yang diterima sebanyak 41 orang.

SEP kemudian ditempatkan menjadi pemeriksa dan pengawas bank di BI. Kemudian, pada 2015, SEP berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seiring perpindahan fungsi pengawasan bank ke lembaga tersebut. Puncaknya, SEP menjabat Deputy Komisioner Pengawas Bank Swasta sebelum akhirnya bergabung ke BPK.

Dari pengalaman kariernya, SEP mengaku mendapatkan banyak pelajaran dari berbagai macam krisis. Dia menyebutkan, antara lain krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008, dan yang terbaru adalah pandemi Covid-19. Krisis pada momen pandemi, menurut SEP, sangat berat karena merupakan krisis multidimensi.

Pada saat krisis tersebut, SEP mengisahkan harus menangani tujuh bank yang nyaris bangkrut. Selain itu juga ikut menyelamatkan beberapa BUMN yang sedang menghadapi masalah keuangan dan PKPU. Penanganan bank menghadapi masalah hingga fundamental bisnisnya yaitu kepercayaan. Waktu itu, bank-bank tersebut mengalami *rush* (nasabah menarik uang besar-besaran).

"Dengan bekal keberanian untuk menawarkan *problem solving*, saya memberanikan diri untuk masuk BPK. Niat saya itu adalah ingin banyak belajar dan berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola dan *risk management* lembaga atau perusahaan."

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII/
Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo

"Dalam kondisi krisis pada 1998 itu kita melikuidasi sekitar 16 bank. Itu hanya krisis moneter yang menyerang sektor finansial. Sementara, krisis pada pandemi Covid-19 lalu itu krisis multidimensi, tekanannya jauh lebih besar. Ada masalah pangan, pengangguran naik, banyak PHK. Orang itu jadi hanya makan dari tabungan. Bayangkan, kalau saat itu bank bermasalah itu ditutup maka orang yang makan tabungan tadi bagaimana? pasti akan terjadi *chaos*," ungkap SEP.

SEP pun berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga bank-bank tersebut dan mencari solusi penyelamatannya. Singkat cerita, bank-bank itu bisa selamat meskipun saat ini masih diperlukan program-program penyehatan.

"Akan tetapi, menurut saya, kita sudah mampu melalui krisis. Bank tidak ada yang ditutup. Perbankan bahkan bisa tumbuh di atas 10 persen. Ekonomi juga bisa kembali tumbuh 5 persen. Itu adalah contoh hasil kerja bersama-sama bukan hanya satu lembaga saja," ujarnya.

Dia menekankan, dalam tantangan seperti itu perlu ada orang yang mampu menjembatani komunikasi dengan baik antarkelembagaan. "Jadi, kuncinya adalah *leader* itu harus mampu melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik serta berani mengambil kebijakan," ungkap SEP.



Museum BPK RI

Menghadirkan koleksi sejarah seputar BPK

**TERBUKA
UNTUK
UMUM
GRATIS!**



Alamat:

Jl. Diponegoro
No 1, Magelang



Buka:

Selasa - Minggu
09:00-15:00



(0293) 310230



museum.bpk.go.id



[museum_bpkri](https://www.instagram.com/museum_bpkri)

Wisata edukasi
di berbagai ruangan menarik



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

Doa dan Harapan untuk BPK

Badan Pemeriksa Keuangan genap berusia 77 tahun pada 1 Januari 2024. Doa dan harapan disampaikan kepada BPK yang senantiasa mengawal pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK juga diharapkan dapat terus memperluas kiprahnya di dunia internasional.

Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin BPK Benteng Pertahanan Indonesia

Selamat HUT ke-77 Badan Pemeriksa Keuangan. Lebih dari 7 dekade BPK RI telah mendedikasikan diri pada bangsa dan negara laksana benteng pertahanan yang kokoh dari segala bentuk penyalahgunaan dana publik.

Di tengah kompleksitas tata kelola keuangan negara, BPK RI diminta mampu mempertahankan relevansi dan efektivitas fungsi pengawasannya dengan membangun pendekatan audit keuangan negara yang inovatif dan adaptif.



Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo Terus Jaga Keuangan Negara



Selamat hari jadi ke-77 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. 77 tahun adalah waktu yang tidak singkat dan selama itu BPK RI senantiasa terus meneladani semangat dan kerja keras dalam menjaga keuangan negara, mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti

Tata Kelola Keuangan Negara Perlu Dijaga Sebaik Mungkin

Selamat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas semangat dan kerja keras yang terwujud nyata. Saya turut bangga atas berbagai pencapaian yang telah diraih BPK melalui kerja keras selama 77 tahun ini.

Indonesia merupakan negara yang begitu luas, tentu saja tata kelola keuangan negaranya perlu dijaga sebaik-baiknya.



President Brazilian Federal Court of Accounts,
Bruno Dantas

Apresiasi atas Pembentukan SAI20



Yang terhormat Dr Isma Yatun dan rekan-rekan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selamat atas hari ulang tahun BPK yang ke-77. Sebagai Presiden INTOSAI, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kerja sama yang telah terjalin dengan BPK untuk meningkatkan peran lembaga pemeriksa keuangan (*supreme audit institution*/SAI) dalam mendorong transparansi dan memperkuat tata kelola.

Secara khusus saya ingin mengapresiasi BPK yang telah menginisiasi terbentuknya Supreme Audit Institution 20 (SAI20). SAI20 menjadi forum di mana SAI dapat menyuarakan perspektif mereka mengenai implementasi kebijakan dan transparansi. Sejak awal berdiri, SAI telah mengadvokasi kebijakan berbasis bukti yang berakar pada kepentingan publik.

Kita semua memiliki posisi unik untuk berkontribusi secara signifikan dalam diskusi G-20, memperkuat suara seluruh komunitas INTOSAI. Kami mengapresiasi kesuksesan BPK sebagai tuan rumah SAI20 dan berterima kasih atas kolaborasi dan keterlibatan Anda."

Auditor General of the National Audit Office of the People's Republic of China (CNAO), Hou Kai

BPK Berperan Penting di Kancah Internasional



Saya sangat gembira mendengar dan mengetahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-77 pada 1 Januari 2024. Pada kesempatan ini, atas nama National Audit Office of the People's Republic of China (CNAO) dan sebagai pribadi, menyampaikan ucapan selamat yang setulus-tulusnya kepada saudara dan rekan-rekan di BPK.

Saya terkesan bahwa selama bertahun-tahun, BPK telah mencapai prestasi luar biasa dengan kontribusi yang berharga terhadap peningkatan kinerja dana publik dan tata kelola negara Anda.

Selain itu, BPK juga telah memainkan peran penting dan mempunyai pengaruh yang luas di kancah internasional, sehingga mendapatkan pengakuan internasional di antara lembaga-lembaga SAI lainnya. Sebagai tetangga yang ramah dan mitra yang baik, kami sangat mengapresiasi pencapaian ini.”

Auditor General Australia National Audit Office, Grant Hehir

BPK Telah Ukir Sejarah di Internasional

Atas nama Australian Nation Audit Office (ANAO), saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Ketua BPK, Anggota BPK, dan seluruh tim di BPK atas perayaan HUT ke-77 BPK. BPK tentu saja telah mencapai tonggak sejarah yang patut diapresiasi, ditandai dengan posisinya dalam komunitas lembaga audit internasional dan inisiatif visionernya, seperti pembentukan SAI20 pada tahun 2022. Keberhasilan KTT SAI20 merupakan bukti kepemimpinan BPK dan menjadi warisan bagi Indonesia di tahun-tahun mendatang.





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perpustakaan Riset

JAM PELAYANAN
Senin-Jumat

07.45
16.15

**TERBUKA
UNTUK UMUM**

Koleksi produk-produk BPK yang
tidak dijumpai di perpustakaan lain



Gedung BPK RI Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat



**Desain
Ruangan
Menarik**



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

New Year,

New Me

Dalam setiap pergantian tahun, banyak dari kita merayakan kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam hidup. Ungkapan *'new year, new me'* mencerminkan semangat untuk melakukan perubahan positif dan mengembangkan diri kita menjadi versi yang lebih baik.

Pergantian tahun sering dianggap sebagai momen untuk merenung, menetapkan tujuan baru dan meninggalkan kebiasaan lama yang mungkin tidak lagi mendukung pertumbuhan pribadi. Dalam perjalanan menuju versi baru diri, kita dihadapkan pada peluang untuk mengeksplorasi potensi tersembunyi, mengatasi tantangan, dan mencapai impian yang mungkin sebelumnya dianggap tidak mungkin.



JCOMP-FREEPIK

Semangat 'new year, new me' memotivasi kita untuk melangkah maju dengan keyakinan bahwa kita dapat membentuk masa depan yang lebih cerah. Mari bersama-sama menjelajahi perjalanan menuju diri yang lebih baik di tahun yang baru ini.

Nah, bagaimana tips agar resolusi di tahun 2024 ini bisa terwujud dengan baik? Untuk menjelaskannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat resolusi di tahun baru, yaitu:

Buatlah tujuan yang dapat dicapai



Terkadang, resolusi tahun baru bersifat umum dan sulit dicapai dalam waktu singkat. Dengan membuat tujuan-tujuan kecil yang mengarah pada pencapaian tujuan besar secara keseluruhan, kemungkinan kesuksesan anda akan meningkat.



Jangan lupa mengapresiasi diri sendiri atas kemajuan yang anda buat, sekecil apapun itu

Sekecil apapun kemajuan yang anda peroleh, jangan lupa memuji diri sendiri, meskipun tampak sepele. Hal ini bisa memperkuat motivasi dan mengingatkan anda bahwa perubahan tidak ada yang instan, melainkan bertahap.



Berikan perhatian pada pencapaian anda yang sudah baik

Resolusi tahun baru sebaiknya tidak hanya fokus pada perubahan aspek negatif, tetapi juga memperkuat aspek positif dalam diri dengan merenungkan dan mensyukuri hal-hal yang telah berjalan baik dalam hidup.

Atur agenda harian anda



Cara meningkatkan peluang keberhasilan resolusi tahun baru adalah dengan menetapkan

agenda spesifik tentang hal-hal apa yang ingin dilakukan setiap harinya. Agenda harian dapat membantu membuat kemajuan yang konsisten.

Selalu gunakan afirmasi positif

Dengan mengarahkan pikiran ke aspek positif dan memotivasi diri secara teratur,



afirmasi membantu mengatasi keraguan, meningkatkan motivasi, dan membentuk pola pikir yang mendukung kesuksesan resolusi tahun baru.

Dengan mengadopsi semangat 'new year, new me' dan mengikuti tips yang telah dijelaskan, maka dapat membantu kita menuju perubahan positif. Jadi, mari terus berkomitmen, belajar dari pengalaman, dan bersama-sama membangun tahun yang penuh makna. Selamat mengejar resolusi dan menjadi versi terbaik dari diri kita.

BPK Perwakilan Kalbar Raih Juara Ketiga LHP Terbaik



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berhasil mendapatkan penghargaan juara ke-3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbaik tahun 2023. Penghargaan itu diberikan atas LHP Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono menyampaikan, pihaknya memang terus aktif mendukung adanya penilaian kualitas LHP di BPK.

"Setiap tahun, BPK menyelenggarakan penilaian kualitas LHP keuangan, kinerja, dan DTT dalam rangka pemberian penghargaan atau *reward*. Sebagai salah satu satuan kerja pemeriksaan di daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selalu berpartisipasi dengan mengusulkan LHP yang menurut kami akan dapat memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama selaku penyelenggara penilaian," ujarnya.

Menurut Wahyu, terdapat sejumlah faktor yang membuat LHP tersebut berhasil mendapatkan penghargaan. Hal itu antara lain hasil pemeriksaan telah dapat menjawab tujuan dan harapan penugasan, permasalahan yang diungkapkan cukup variatif serta LHP telah disusun secara tepat waktu dengan memperhatikan gaya bahasa selingkung, akurasi angka, dan konsistensi.

Wahyu menyampaikan, proses penyusunan LHP dilaksanakan pada Desember 2022 yang bersamaan dengan penugasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan kerugian keuangan daerah semester II tahun 2022. Selain itu, terdapat periode masa libur akhir tahun yang mengurangi hari kerja efektif. Hal itu menjadi salah satu tantangan dalam proses pemeriksaan.



▲ Pemeriksa melakukan cek fisik untuk penyusunan LHP.

Untuk menyiasatinya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan jadwal reviu Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) dengan memperhitungkan target waktu penyelesaiannya. Reviu tahap awal oleh tim reviu dilakukan segera setelah pemeriksaan lapangan selesai.

Reviu KHP dilanjutkan secara berjenjang oleh Pengendali Teknis (PT), Wakil Penanggung Jawab (WPJ), dan Penanggung Jawab (PJ) yang dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan. Proses finalisasi oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan (HTUK) yang mencakup pengecekan kesesuaian penulisan, akurasi angka dan konsistensi dilaksanakan bersamaan dengan proses reviu oleh PJ.

Wahyu menyampaikan, penetapan target penyelesaian LHP, pelaksanaan reviu oleh tim reviu maupun secara berjenjang, serta finalisasi oleh HTUK telah dilakukan secara rutin dalam setiap proses penyusunan LHP. Atas keberhasilan mendapatkan penghargaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pun turut memberikan apresiasi kepada tim pemeriksa yang mengerjakan LHP.



"Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menargetkan untuk mendapatkan penghargaan LHP atas jenis pemeriksaan yang lain dengan terus mendorong tim pemeriksa agar lebih baik lagi dalam menyusun LHP dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) pendukungnya sesuai juklak dan juknis," ujar Wahyu.

Dikutip dari LHP kepatuhan tersebut, BPK menemukan beberapa permasalahan ketidakpatuhan. Hal itu antara lain kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada dua SKPD senilai Rp10,26 miliar tidak terlaksana. Selain itu, pelaksanaan tender 13 paket pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan pedoman pemilihan penyedia.

BPK juga menemukan, kekurangan volume senilai Rp839 juta pada lima paket pekerjaan rekonstruksi jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta terdapat penanganan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis tidak sesuai syarat-syarat umum kontrak.

"Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menargetkan untuk mendapatkan penghargaan LHP atas jenis pemeriksaan yang lain dengan terus mendorong tim pemeriksa agar lebih baik lagi dalam menyusun LHP dan KKP pendukungnya sesuai juklak dan juknis."

Atas temuan-temuan itu, BPK merekomendasikan antara lain kepada Bupati Bengkayang agar memerintahkan kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran menyusun usulan anggaran belanja sesuai pedoman, serta lebih optimal dalam mengendalikan penyusunan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bupati Bengkayang juga perlu meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam memverifikasi dan mengevaluasi usulan anggaran belanja dari SKPD.

BPK juga merekomendasikan Bupati Bengkayang agar memerintahkan Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menginstruksikan Pokja Pemilihan lebih cermat dalam melakukan evaluasi atas dokumen penawaran peserta tender. Selain itu, Kepala Dinkes PPKB dan Kepala Dinas PUPR selaku pengguna anggaran menginstruksikan pejabat pembuat komitmen (PPK) lebih optimal dalam menyimpan dan menjaga dokumen pelaksanaan kegiatan.



▲ Pemeriksa melakukan cek fisik untuk penyusunan LHP.

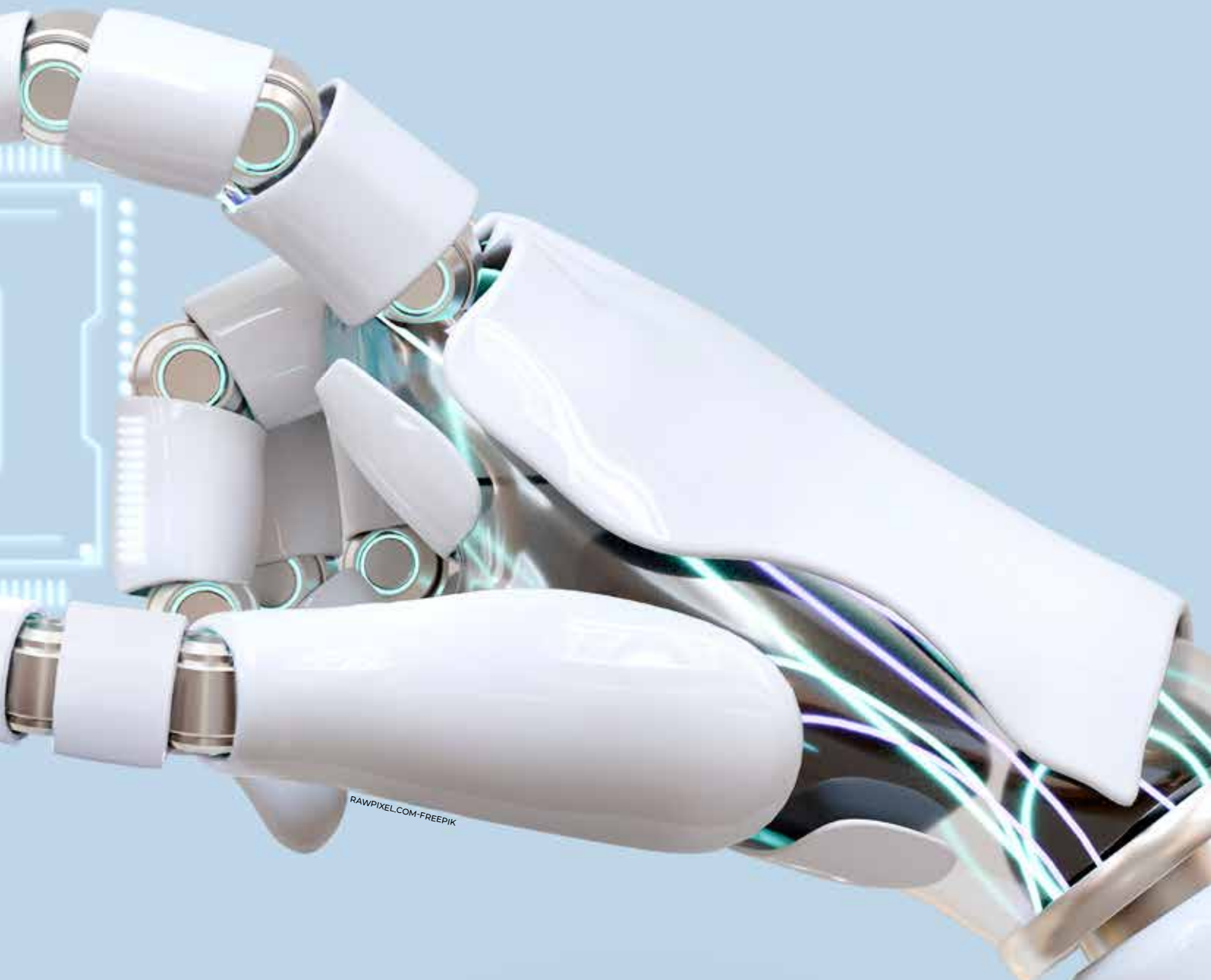
Mengungkap Peluang AI dalam Membantu Pemeriksaan BPK

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dinilai sangat besar untuk diterapkan di BPK.

Terutama, untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan. Hal itu diungkapkan dalam artikel yang ditulis oleh Kepala Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja TI Biro TI BPK, Pingky Dezar Zulkarnain dan Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro TI Nia Angga Ratnafiri Mashuri.

"Seperti halnya manusia yang berkembang mulai dari bayi, balita, remaja, sampai dewasa, AI juga mengalami perkembangan secara bertahap dari yang paling sederhana sampai yang kompleks," ungkap penulis di artikel tersebut.

AI dapat dikembangkan melalui cara yang paling sederhana dengan pendekatan *Rule-Based*, atau cara yang rumit dengan pendekatan *Machine Learning*. Dengan adanya pendekatan tersebut, maka BPK dapat mengembangkan AI yang sesuai kebutuhan.



Tahun 2023 dinilai sebagai momentum penerapan AI yang makin masif dan bersahabat. Kemunculan ChatGPT sebagai sebuah produk AI telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk merasakan dampak AI secara langsung baik positif maupun negatif.

ChatGPT adalah suatu *language model* yang dikembangkan oleh OpenAI, sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). ChatGPT merupakan bentuk implementasi dari formulasi GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) yang pertama kali diperkenalkan oleh OpenAI pada tahun 2018.

Melalui ChatGPT, kita bisa melakukan percakapan seperti Whatsapp ataupun Telegram. ChatGPT dapat merespons berbagai pertanyaan mengenai banyak hal dengan berbagai topik dengan cara yang sangat natural sehingga seakan-akan kita melakukan percakapan dengan sesama manusia, bukan dengan mesin. Meski demikian, kualitas respons yang diberikan oleh ChatGPT sangat tergantung kepada beberapa hal, seperti struktur pertanyaan diajukan dan konteks pertanyaan tersebut.

"ChatGPT mungkin memberikan jawaban yang salah akibat struktur pertanyaan yang salah, atau karena konteks pertanyaan di luar jangkauan ChatGPT."



FREPIK

"Proses pembentukan model tersebut menggunakan sumber daya komputasi yang besar karena data yang digunakan untuk proses ML melibatkan miliaran kata dan menggunakan jutaan parameter."

Pinky dan Nia menganalogikan AI seperti halnya jus jeruk. Jus jeruk, pada prinsipnya berasal dari satu atau beberapa buah jeruk yang diblender (proses) agar lebih mudah dinikmati (dimanfaatkan) manusia. Serupa dengan itu, AI berasal dari kecerdasan satu atau lebih manusia yang dikumpulkan dan diolah menggunakan algoritma tertentu sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

Seperti halnya jus buah yang kadang hasilnya tidak sesuai harapan, baik dari segi rasa maupun tekstur karena pengaruh bahan baku atau alat pengolahnya, hasil produk AI terkadang juga tidak sesuai harapan. AI bisa tidak akurat dan tidak relevan karena pengaruh banyak faktor seperti faktor pengetahuan manusianya, algoritmanya, atau data yang digunakan untuk membangun modelnya.

Seiring dengan perkembangan AI dan teknologi informasi yang menyertainya, konsep pendukung penerapan AI juga mengalami akselerasi yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir ini. Konsep yang sangat erat dan menjadi mutlak dalam membangun dan menerapkan AI adalah konsep mengenai *Machine Learning* (ML) yang sudah diperkenalkan beberapa tahun sebelum AI muncul.

Jauh sebelum ada pendekatan ML, terdapat dua pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah sistem yang dapat meniru bagaimana manusia mengambil keputusan, yaitu *Rule-based System* dan *Case-based Reasoning*. *Rule-based System* menggunakan klausa IF-THEN dalam penerapannya, dan merupakan cara yang paling sederhana dan paling umum karena tidak memerlukan data untuk dipelajari, melainkan melalui penerapan peraturan atau standar ke dalam alur logika pemrograman. Sedangkan *Case-based Reasoning* bekerja dengan cara mereplikasi pemecahan masalah yang pernah dijalankan atas kasus-kasus yang terjadi di masa lalu untuk menghadapi kasus saat ini.

ML sendiri merupakan salah satu metode pengembangan AI yang mensyaratkan adanya data-data masa lalu untuk dapat dipelajari dan dicari pola yang tersembunyi. ML mengalami perkembangan yang pesat meliputi perkembangan model, algoritma, dan data yang merupakan komponen utama dalam ML. Dari sisi model dan algoritma, perkembangan ML mendorong munculnya konsep-konsep baru seperti *Deep Learning* dan *Neural Network*. Sedangkan dari sisi data, ML dapat memproses berbagai jenis data mulai data dalam bentuk tabulasi yang terdiri dari baris dan kolom (data terstruktur) dan data berbentuk teks, gambar, video, dan audio (data tak terstruktur). Pemrosesan Data Terstruktur menggunakan konsep yang disebut *Data Mining*, sedangkan untuk Data Tak Terstruktur menggunakan konsep antara lain *Text Mining*, *Image Processing*, dan *Computer Vision*.

Disebutkan, penerapan AI di industri ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sedangkan di tataran praktikal, konsep AI disajikan kepada pengguna dalam bentuk solusi teknologi yang tinggal pakai. Contoh mengenai penerapan AI yang ter viral adalah ChatGPT yang dibangun oleh OpenAI. ChatGPT bukan *search engine*, melainkan mirip dengan *chatbot* dengan jawaban lebih natural dan bukan *template*. ChatGPT merupakan bentuk *Large Language Model* (LLM) yang dikembangkan dengan konsep meliputi *deep learning*, *neural network*, *natural language processing*, dan *optimization*.

"Proses pembentukan model tersebut menggunakan sumber daya komputasi yang besar karena data yang digunakan untuk proses ML melibatkan miliaran kata dan menggunakan jutaan parameter."

Lantas, bagaimanakah implementasi AI dalam konteks pemeriksaan BPK? AI memberikan peluang yang cukup banyak untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis di BPK dalam bidang pemeriksaan, yang telah diwujudkan melalui pengembangan Big Data Analytics (BIDICS) BPK. Melalui penerapan *rule-based*, BIDICS mampu menyajikan daftar anomali pada pengadaan barang dan jasa. Kemudian, melalui penerapan *Text Mining*, BIDICS juga mampu melakukan klusterisasi untuk menunjukkan tingkat kemiripan judul kontrak yang mengindikasikan adanya pemecahan pengadaan barang dan jasa untuk menghindari proses lelang.

Selain itu, dengan menerapkan konsep *Association Rule*, BIDICS dapat mengidentifikasi sekelompok perusahaan yang sering secara bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, di mana ini merupakan petunjuk adanya kemungkinan *bid-rigging*. Pemanfaatan informasi tersebut dapat dieksplorasi lebih lanjut oleh Pemeriksa.

Kemudian, AI juga bisa dimanfaatkan untuk membantu pemeriksa tidak hanya untuk menetapkan ukuran sampel namun juga memilih sampel yang representatif. AI juga bisa membantu pemeriksa untuk melakukan penilaian atas tingkat kerusakan gedung dan bangunan. Lebih lanjut lagi, dengan tersedianya ribuan data dan pengalaman pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan pusat yang dapat digali polanya, maka BPK bisa saja suatu saat nanti menerapkan AI dan otomasi yang disebut Intelligence Process Automation (IPA) dalam bentuk Sistem Rekomendasi Opini. Dengan dukungan aplikasi Standardized and Integrated Audit Process (SIAP) yang juga sudah terintegrasi dengan *platform* BIDICS, hal ini menjadi tantangan bagi para penikmat AI, otomasi, dan *data science* di BPK untuk mewujudkan BPK sebagai *Data-Driven organization*.

Dengan demikian, menurut Pingky dan Nia, AI merupakan sebuah alat ampuh yang dapat mencapai kemampuan luar biasa. Namun, potensi sebenarnya justru terletak pada kemampuan manusia untuk memanfaatkannya dengan bijak, dengan tidak melebihi-lebihkannya, dan juga tidak meremehkan potensinya untuk mengubah budaya kerja di BPK.



Pengamanan **Password**



- **Gunakan *password* yang kuat**

Panjang *password* minimal 8 karakter.

- Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.

- Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.

- **Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri**
Contoh : tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

Jaga Keamanan **Password**

Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

Tidak menggunakan *password* yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.

Contoh : menggunakan *password* yang berbeda untuk sosmed dan akun BPK.

Tidak menuliskan *password* di kertas/media lain yang terlihat dengan mudah.

Logout dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

Mulai Pemeriksaan 35 K/L, Ketua BPK Ingatkan Soal Permasalahan Berulang



▲ Ketua BPK Isma Yatun selaku Plt Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK.

► *Entry meeting* pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 dihadiri oleh menteri dan pimpinan lembaga entitas pemeriksaan di lingkungan AKN III BPK.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan agar pimpinan kementerian/lembaga memberikan perhatian kepada permasalahan berulang yang menjadi temuan pemeriksaan. Temuan tersebut antara lain permasalahan dalam pengelolaan kas, permasalahan dalam persediaan, serta permasalahan aset tetap dan aset lainnya.

"Kami meyakini, seluruh menteri dan pimpinan lembaga memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya," kata Ketua BPK saat melakukan *entry meeting* di kantor pusat di Jakarta, pada Jumat (5/12/024).

Kegiatan *entry meeting* ini sekaligus menandai dimulainya pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 untuk 35 kementerian/lembaga negara di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III BPK.

"*Entry meeting* ini menjadi awal kolaborasi dan sinergi BPK dengan kementerian dan lembaga di lingkungan AKN III untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, pruden, dan profesional," ujar Ketua BPK Isma Yatun selaku Plt Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK.

Pemeriksaan laporan keuangan, Ketua BPK menjelaskan, adalah pemeriksaan *mandatory* yang diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



▲ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan kementerian/ lembaga (LKKL).

"Untuk itu, laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami informasinya oleh para pengguna adalah keniscayaan," imbuh Ketua BPK.

Entry meeting pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 dihadiri oleh menteri dan pimpinan lembaga entitas pemeriksaan di lingkungan AKN III BPK. Hadir pula pimpinan BPK serta pemeriksa dan pelaksana di lingkungan AKN III BPK.

Terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) pada semester I tahun 2023, Ketua BPK mengungkapkan, rata-rata penyelesaian TLRHP berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut adalah 83,90%. Peringkat tertinggi penyelesaian TLRHP adalah Mahkamah Agung (100%), Sekretariat Kabinet (100%), Arsip Nasional RI (100%), dan Mahkamah Konstitusi (99,04%).

"Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian krusial dalam proses pemeriksaan, terutama untuk memperkuat dampak pemeriksaan bagi perbaikan tata kelola keuangan negara," jelasnya.

◀ Para menteri dan pimpinan lembaga entitas pemeriksaan di lingkungan AKN III BPK.



BPK Serahkan Laporan PKN dan Pemeriksaan Investigatif kepada KPK

► Wakil Ketua BPK Hendra Susanto menyerahkan laporan hasil penghitungan kerugian negara (PKN) kepada Ketua KPK.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mengapresiasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat. KPK sangat berharap ke depannya hubungan kerja sama terkait PKN dan pemeriksaan investigatif dapat lebih ditingkatkan.

"Hubungan kerja sama antara KPK dan BPK dapat ditingkatkan terutama dalam proses penyidikan pada perkara-perkara yang menggunakan metode membangun kasus (*case building*), yang berbeda dengan kasus-kasus yang biasa dilakukan KPK yang dengan menggunakan metode operasi tangkap tangan (OTT) dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua BPK Hendra Susanto menyerahkan secara langsung 2 laporan hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan 1 laporan hasil pemeriksaan investigatif kepada Ketua KPK. Pemeriksaan investigatif dan PKN tersebut dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari KPK.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK mengungkapkan bahwa laporan yang diserahkan tersebut adalah PKN atas Pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Mulai dari proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Laporan PKN lainnya yang diserahkan adalah Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Corpus Christi Liquefaction LLC pada PT Pertamina (Persero). Berdasarkan hasil pemeriksaan entitas tersebut, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Pertamina (Persero).

Sedangkan laporan hasil pemeriksaan investigatif yang diserahkan adalah pemeriksaan atas kegiatan investasi berupa akuisisi perusahaan Maurel & Prom (M&P) oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) tahun 2012-2020.



Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT Pertamina (Persero).

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), pemeriksaan investigatif dilakukan BPK guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan PKN dilakukan untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Anggota I BPK: Pemeriksaan Harus Komprehensif dan Terarah



◀ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus diperiksa agar setiap pihak yang mengelola uang negara dapat menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK harus mampu memberikan pandangan yang komprehensif dan terarah atas capaian kinerja pemerintah sesuai dengan rencana strategis (renstra) yang telah dicanangkan," ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana pada *entry meeting* pemeriksaan atas 10 kementerian/ lembaga (K/L) di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I di kantor BPK pusat, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Pada kesempatan tersebut, Anggota I BPK mengatakan bahwa BPK setiap tahun melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bersifat *mandatory*.

"Tujuan pemeriksaan atas LK adalah menilai kewajaran LK yang tercermin pada opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK," jelasnya.

Beberapa hal yang menjadi fokus pemeriksaan di antaranya terkait belanja barang dan belanja modal yang belum sesuai. "Untuk itu, saya berharap supaya akses terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan agar diberikan seluas-luasnya, serta mendorong peran serta APIP dalam memperlancar pelaksanaan pemeriksaan," tutupnya.

Dia juga menekankan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, BPK tidak dapat bekerja sendiri untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan entitas yang diperiksa yaitu pihak manajemen, termasuk aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Anggota II BPK Minta Pemeriksaan LK Kementerian PPN/Bappenas Tepat Waktu



▲ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daniel Lumban Tobing meminta agar pemeriksaan laporan keuangan (LK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tahun 2023 dilaksanakan dengan tepat waktu. Karenanya, perencanaan pun harus dilakukan dengan seksama.

"Semua tahapan pemeriksaan dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Untuk itu kami mengimbau agar tanggal-tanggal penting dalam tahapan pelaksanaan pemeriksaan menjadi acuan bagi tim dan seluruh jajaran Kementerian PPN/Bappenas, sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan," kata dia saat memimpin *entry meeting* pemeriksaan atas LK Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023 di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Tujuan dari pemeriksaan atas LK yang dilakukan oleh BPK adalah untuk memberikan opini atas kewajaran LK kementerian/ lembaga. Dalam hal ini, BPK mempertimbangkan empat aspek, yaitu kesesuaian LK dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan dalam LK, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Selain itu, pemeriksaan ini juga merupakan bagian dari peran dan tanggung jawab BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Anggota II BPK pun berharap agar pemeriksaan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Menurut dia, BPK melaksanakan mandat konstitusi dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satunya adalah laporan keuangan (LK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tahun 2023.

"Kami melaksanakan pemeriksaan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Selain itu, pemeriksa BPK juga harus mematuhi kode etik yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018," ujar dia.



▲
Pimpinan
Pemeriksaan
Keuangan Negara/
Anggota II BPK Daniel
Lumban Tobing
menyerahkan surat
tugas pemeriksaan
kepada Menteri
PPN/Kepala
Bappenas Suharso
Monoarfa saat *entry
meeting* pemeriksaan
atas LK Kementerian
PPN/Bappenas.



◀
Pimpinan
Pemeriksaan
Keuangan Negara/
Anggota IV BPK
Haerul Saleh

BPK Dorong PUPR Tingkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini karena tindak lanjut rekomendasi yang telah diselesaikan Kementerian PUPR per semester I tahun 2023 belum sesuai dengan target yang ditetapkan BPK, yakni di atas 75%.

Hal ini diungkapkan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota IV BPK Haerul Saleh saat *entry meeting* pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian PUPR tahun 2023 di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/1/2024). "Kami berharap agar pemenuhan rekomendasi ini dapat ditingkatkan lagi dan segera diselesaikan selama proses pemeriksaan ini," ujar Anggota IV BPK.

"Karena tindak lanjut merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini laporan keuangan," tambah dia.

Memang, kata Anggota IV BPK, opini laporan keuangan Kementerian PUPR tahun sebelumnya mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP). Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa tidak ada jaminan opini pada tahun 2023 juga akan WTP.

"Hal ini tergantung dari pengendalian dan kepatuhan menteri beserta jajarannya dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2023," tegas Anggota IV BPK.

BPK akan memulai pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2023. Hal ini ditandai dengan diserahkannya surat tugas pemeriksaan oleh Anggota IV BPK kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam *entry meeting*.

Sementara itu, Menteri PUPR dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kementerian berupaya untuk mempertahankan opini WTP. Ini antara lain dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Kementerian PUPR juga meningkatkan efektivitas pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengoptimalkan peran Unit Kepatuhan Intern (UKI) dan

aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan. "Kementerian PUPR siap diperiksa," kata Menteri PUPR dalam kegiatan yang digelar secara hibrida tersebut.

Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan tugas konstitusional BPK. Anggota IV BPK menerangkan, sebagai bagian akhir dari proses pemeriksaan, BPK akan memberikan opini atas laporan keuangan Kementerian PUPR selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan (*unaudited*) dari Kementerian PUPR.

Selain laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2023, BPK juga melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan bagian anggaran belanja subsidi (BA 999.07) tahun 2023. Dalam hal ini, Kementerian PUPR menjadi Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN).



▲
Anggota IV BPK
berbincang dengan
Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono.

▼
Penyerahan surat
tugas pemeriksa
oleh Anggota IV
BPK kepada Menteri
PUPR Basuki
Hadimuljono dalam
entry meeting.

Stakeholder Harapkan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Berkualitas



▲ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK
Ahmadi Noor Supit

Pentingnya laporan keuangan (LK) yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh penggunanya merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. "Oleh karena itu, pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas dan komprehensif, termasuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah, sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*)," jelas Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit.

Hal tersebut dia sampaikan pada saat memimpin *entry meeting* pemeriksaan atas LK kementerian/ lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V di kantor BPK pusat, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Dia menjelaskan, selama ini publik memiliki harapan besar bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara serta daerah. "Hal ini diwujudkan melalui penerbitan hasil pemeriksaan LK yang tepat waktu dan berkualitas," ujar dia.

"Kami yakin bahwa seluruh menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang mereka kelola," tambah dia.



Disebutkan pula bahwa pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) juga merupakan bagian yang krusial dalam proses pemeriksaan. Terutama untuk meningkatkan dampak pemeriksaan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara. Capaian TLRHP disarankan menjadi salah satu indikator kinerja keberhasilan satker.

Anggota V BPK pun berharap agar selama proses pemeriksaan berlangsung, tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa dapat menjaga nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme. Karena nilai itu sebagai landasan utama dalam bersinergi demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

▼
Entry meeting pemeriksaan atas LK kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) di lingkungan AKN V di kantor BPK pusat, Jakarta.



Ini Hal yang Disoroti BPK Terkait Kompensasi BBM dan Listrik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti beberapa hal yang harus mendapat perhatian terkait dengan subsidi. Salah satunya adalah belanja kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tahun 2022 yang meningkat drastis hingga mencapai Rp352 triliun. Angka tersebut melebihi jumlah total subsidi untuk semua sektor, yaitu Rp245 triliun.

"Subsidi memang ditargetkan untuk masyarakat kurang mampu, namun untuk kompensasi nyatanya lebih banyak dinikmati kalangan mampu," ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo pada saat memimpin *entry meeting* pemeriksaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan BUMN, di kantor pusat BPK, Senin (15/1/2024).





◀
Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara/
Anggota VII
BPK Slamet Edy
Purnomo pada saat
memimpin *entry
meeting* pemeriksaan
Kementerian BUMN,
SKK Migas, dan BUMN,
di kantor pusat BPK,
Senin (15/1/2024).

Atas hal tersebut, Anggota VII BPK pun mengingatkan agar Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM untuk segera mendorong penyesuaian dengan harga yang sifatnya *forward looking*. Dengan begitu, neraca pemerintah maupun BUMN bisa menjadi lebih sehat.

"Makanya kami disini juga mengundang rekan-rekan dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II yang membawahi pemeriksaan di Kementerian Keuangan, AKN IV yang memeriksa Kementerian ESDM, sehingga kami dalam mencari solusi tidak berdiri sendiri, melainkan berkoordinasi lintas AKN," jelasnya.

Menutup sambutannya, Anggota VII BPK menekankan perlunya dilakukan perbaikan atas permasalahan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, komunikasi antara BPK dan entitas harus ditingkatkan.

Anggota VII BPK menjelaskan, *entry meeting* merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa. Tujuannya, untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.



Laboratorium Forensik Digital BPK berhasil mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atas kompetensinya sebagai laboratorium pengujian dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

Pemilu 2024 dan Kontribusi BPK Untuk Negeri



Indra
Subaud 1c2

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

Dasar Hukum dan Sejarah Singkat KPU dan Pemilu

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem pemilihan pemerintah melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat baik untuk presiden dan wakil, kepala daerah dan anggota legislatif dari tingkat nasional sampai daerah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih DPRD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen UUD 1945 pasal 22 E ayat 5 menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Atas dasar UUD 1945 tersebut maka sebagai turunannya pada tahun 1999 dibentuklah suatu lembaga negara bernama Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU.

Pada awalnya KPU terdiri dari elemen pemerintah dan partai politik. Namun pada tahun 2000 berlaku Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak diperbolehkan berasal dari anggota partai politik. Oleh karena itu akhirnya anggota KPU terdiri dari usur lembaga swadaya masyarakat dan akademisi sesuai Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU. Jumlah anggota KPU sesuai Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, semula berjumlah 53 orang dipangkas menjadi 11 orang dan kemudian dikerucutkan kembali dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011 menjadi 7 orang dan dilakukan Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU. Keputusan tersebut berlaku hingga saat ini.

BPK dan KPU

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggaraan Pemilu, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Terdapat empat (4) isu strategis dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi tersebut, yaitu:



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



SURA

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI



SULU

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Maskot Pemilu 2024

- Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik;
- Biaya politik yang tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara cepat;
- Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi; dan
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi.

Asas pemilu berintegritas termaktub dalam UUD 1945 Pasal 22E Ayat 1 yang berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam setiap lima tahun sekali". Terdapat beberapa poin penting dalam pemilu berintegritas yaitu jujur, perilaku etik, kesetaraan, keterbukaan dan tanggung jawab serta akurasi. Berdasarkan poin penting tersebut maka BPK dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan pemilu berintegritas yaitu tanggung jawab dan akurasi dalam hal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dipergunakan untuk kegiatan tahapan pemilu terutama pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 secara serentak seluruh Indonesia.

"BPK mengemban harapan masyarakat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam Amanah UUD 1945."

Kontribusi BPK dalam Pemilu 2024

BPK sebagai lembaga tinggi negara yang diberikan mandat untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah menetapkan strategi pemeriksaan di dalam Renstra BPK 2020-2024. Peran BPK dalam pencapaian tujuan bernegara dilakukan untuk mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam Renstra BPK 2020–2024. Dalam Renstra BPK 2020 – 2024 disebutkan bahwa BPK memiliki mandat diantaranya untuk melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan atas penyelenggaraan Pemilu di KPU sesuai penjelasan Pasal 14 dan Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. BPK berupaya merealisasikan renstra yang telah ditetapkan untuk mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dengan menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah tersebut. Dalam tugas dan fungsinya BPK menggunakan standar pemeriksaan yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Peran penyelenggara Pemilu yang berintegritas sangat strategis dalam membangun demokrasi Indonesia terutama dalam Pemilu 2024. Integritas penyelenggara pemilu adalah titik awal dalam menjadikan Pemilu 2024 sebagai pondasi utama untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia yang berkualitas, sehingga terlahir para pemimpin yang dikehendaki rakyat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selain integritas dari penyelenggara pemilu, para pemangku kepentingan pemilu (*stakeholders*) terkait seperti BPK juga harus mempertahankan integritasnya dalam melakukan pemeriksaan tahapan pemilu 2024 agar Indonesia mampu melahirkan para pemimpin yang dapat diandalkan dan bersih dari korupsi. Integritas, Independensi dan Profesionalisme yang merupakan nilai dasar BPK harus benar-benar aplikatif dalam berkontribusi melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang lebih baik yang lahir dari proses demokrasi.

BPK mengemban harapan masyarakat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam Amanah UUD 1945. Sebuah negara demokratis dapat terwujud jika keuangan negara yang dibelanjakan dapat pertanggungjawaban kepada rakyatnya, termasuk APBN yang digunakan oleh KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Oleh karena itu masyarakat Indonesia sangat berharap kepada BPK selain menjaga fungsi utama BPK kawal harta negara, adalah meningkatkan kapabilitas, integritas, independensi, profesionalitas, dan mampu menjadi *sparring partner* yang andal bagi pemerintah terutama berperan aktif menyukseskan hajatan besar bangsa Indonesia tahun 2024 yaitu Pemilu yang diamanahkan kepada KPU. Sehingga melalui peran aktif BPK dapat memacu kinerja KPU untuk lebih baik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Sebab melalui transparansi keuangan negara dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap KPU dan memastikan KPU bekerja bagi kemaslahatan masyarakat dalam melahirkan pemimpin yang berintegritas.

Penulis ingin mengajak kepada seluruh pemeriksa BPK untuk ikut terlibat aktif dalam proses pemilu 2024 dengan memberikan hak suara atau tidak golput (tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin) meskipun pada tanggal 14 Februari 2024 tidak sedang berada di lokasi TPS yang seharusnya. Apalagi mungkin beberapa pemeriksa mempunyai alamat KTP yang tidak sesuai dengan alamat domisili, karena tuntutan pekerjaan atau bahkan pada tanggal tersebut sedang melakukan pemeriksaan di luar kota.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2022 pasal 116 yang pada intinya disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal salah satunya menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, pindah domisili dan bekerja di luar domisilinya. Sehingga berdasarkan Peraturan tersebut pemeriksa tetap dapat ikut memberikan hak suaranya.

Bagaimana caranya? Masih dalam PKPU yang sama yaitu Pasal 117 disebutkan bahwa untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan cara:

- a. menunjukkan KTP-el atau KK; dan
- b. melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mari jangan lupa berkontribusi untuk negeri dengan memberikan hak suara pada pemilu 2024, ajak teman, saudara dan tetangga untuk ikut terlibat, karena pemilu 2024 telah membutuhkan biaya yang cukup besar yang digunakan dari APBN kita.

Sumber referensi:

- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024; dan
- Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.



1



2



3



4



6



5

1-3 Ketua BPK Isma Yatun dan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto memberikan pengarahan kepada pegawai Auditorat Utama Investigasi, 25 Januari 2024.

4-6 Ketua BPK Isma Yatun didampingi Wakil Ketua BPK Hendra Susanto menghadiri *Focus Group Discussion* dengan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana, 29 Januari 2024.



7



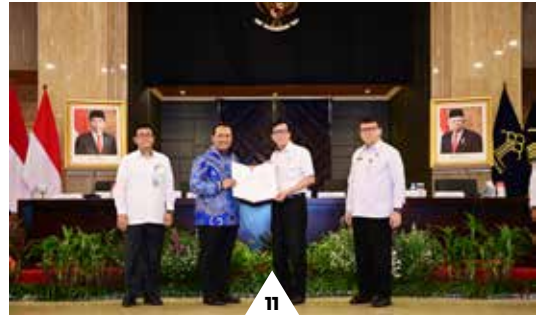
8



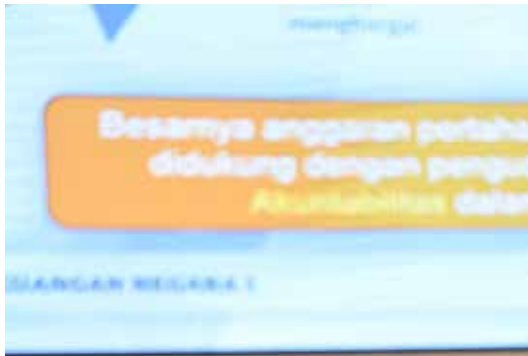
9



10



11



12



13

7-9 Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menghadiri *entry meeting* pemeriksaan terinci atas laporan keuangan (LK) Polri tahun 2023, di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, 16 Januari 2024.

10-11 *Entry meeting* pemeriksaan atas LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2023 dihadiri oleh Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana. *Entry meeting* dilaksanakan di kantor Kemenkumham, Jakarta, 24 Januari 2024.

12-13 Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan kuliah umum kepada Taruna Akademi Angkatan Darat yang diselenggarakan di Yogyakarta, 19 Januari 2024.



14



15



16



17



18



19

14-15 Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing menghadiri entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kemenperin tahun anggaran 2023, di Jakarta, 30 Januari 2024.

16-17 Entry meeting pemeriksaan LK Kementan dihadiri Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh. Entry meeting dilaksanakan di kantor pusat Kementan, di Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.

18-19 Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Provinsi Jambi, 15 Januari 2024.

20 Audiensi Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo dengan IDSurvey, 30 Januari 2024.



20



PENGAMANAN Email



Teliti sebelum membuka email

- Baca *subject*.
- Periksa alamat pengirim.
- Pastikan tidak ada hal yang mencurigakan.



Membuka email di perangkat yang dipastikan keamanannya.



Tidak membuka *attachment* atau klik link yang belum dapat dipastikan keamanannya/dikirim oleh orang tidak dikenal.

Berhati-hati jika harus membuka email di komputer publik (misalnya warnet atau komputer di bandara).



Pastikan *logout* dari aplikasi email jika menggunakan perangkat publik/orang lain.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



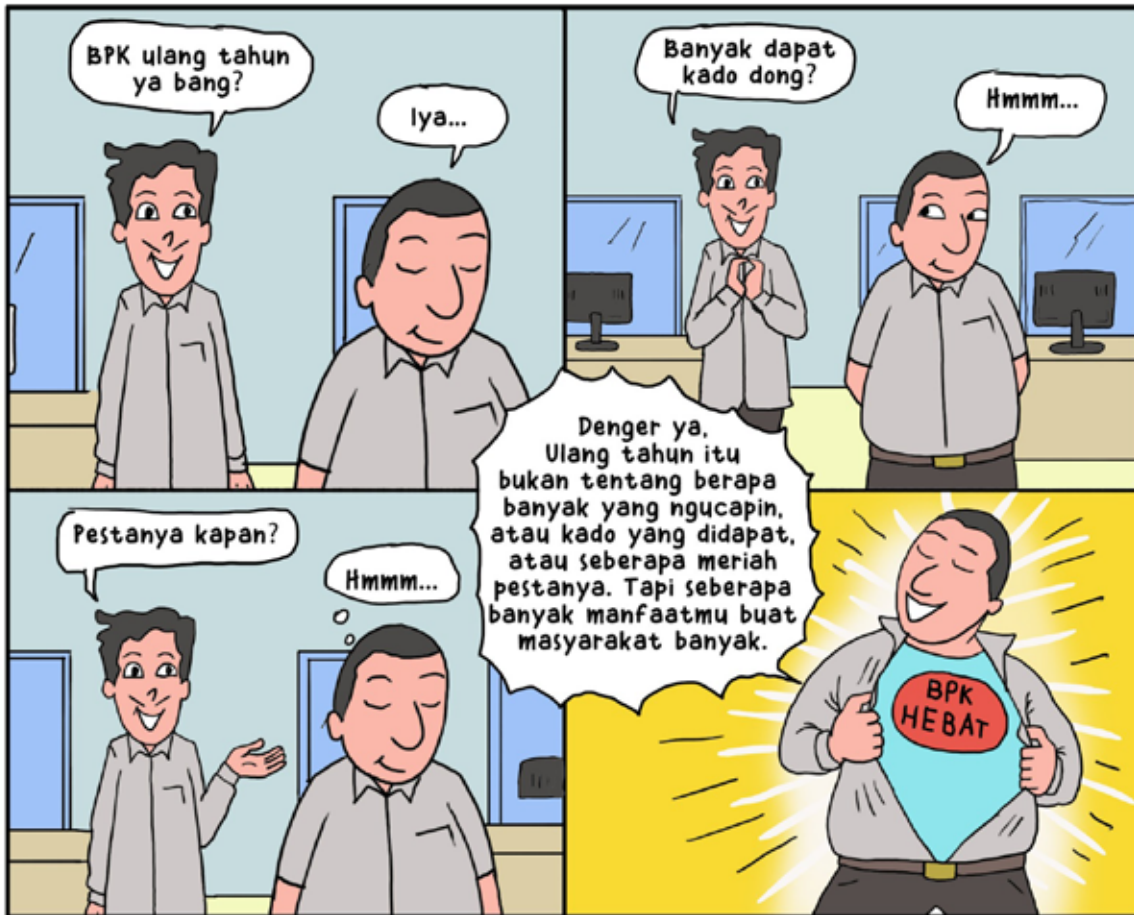
BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri



KUIS

Dalam majalah *Warta Pemeriksa* edisi Desember 2023 disebutkan bahwa BPK pada 27 November sampai 1 Desember 2023 mengadakan *international training* mengenai Audit SDGs.

Apakah fokus dari *training* tersebut?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

**Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!**



DIRGAHAYU



1 Januari 1947 - 1 Januari 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri